

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh seminar proposal
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AMALIA DEWI INDRIYANA
NIM. 135030401111013



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018

*“Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa
kau lakukan”*

Eleanor Roosevelt

*“Percayalah pada mimpi Anda. Orang-Orang
mungkin akan Berkata bahwa Anda tidak akan
mencapainya dan hanya membuang-buang
waktu. Jika Anda terus mengingat mimpi anda,
melakukan riset, dan mau bekerja keras, mimpi
Anda bisa menjadi kenyataan”*

Dave Thomas

*“Dibalik hujan yang deras tersimpan akhir
pelangi” yang indah”*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam
Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

Disusun oleh : Amalia Dewi Indriyana

NIM : 135030401111013

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 9 Mei 2018

Komisi Pembimbing
Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA, AK,

NIP. 2014058 406172 000

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Mei 2018
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Amalia Dewi Indriyana
Judul : Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan
Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Latifah Hanum, SE, MSA, Ak
NIP. 20140584 0617 2 001

Anggota


Drs. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

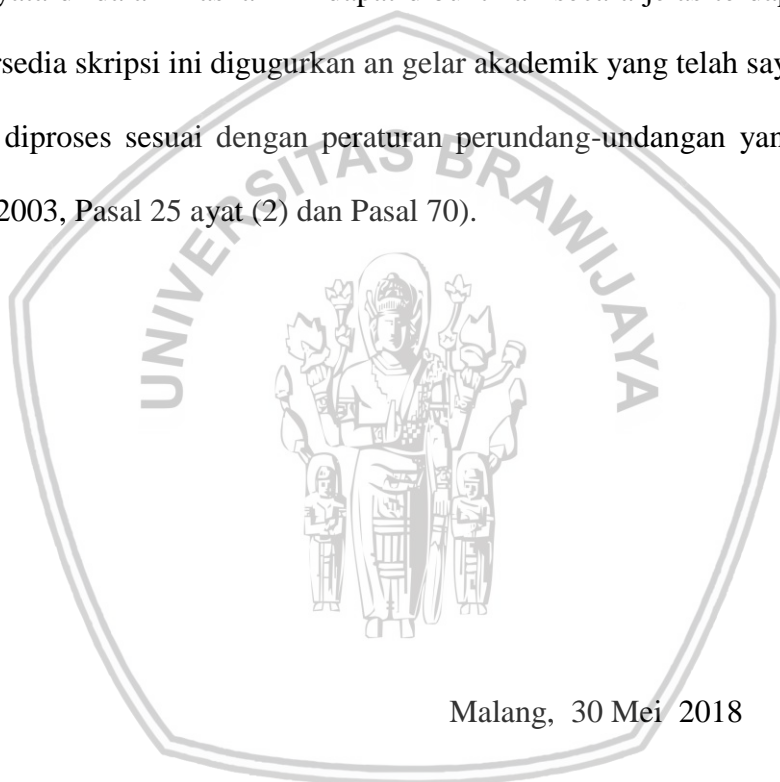
Anggota


Damas Dwi Anggoro, SAB, M.A
NIP. 20160789 0626 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan an gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70).



Malang, 30 Mei 2018

Amalia Dewi Indriyana

RINGKASAN

Amalia Dewi Indriyana, 2018, **Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah** (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), Latifah Hanum, SE, MSA, Ak, 152 Halaman

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dan pungutan pajak daerah salah satunya dengan cara meningkatkan penerimaan melalui Pajak Hotel. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel menganut sistem *self assessment* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hal ini menjelaskan bahwa pajak hotel dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan ayat 1 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Mengetahui dan menganalisis kendala yang ada dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel dan cara menyelesaikan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang. Serta juga peneliti ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data hasil wawancara dan data sekunder berupa data primer yaitu mewawancarai pegawai Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah dan wajib pajak hotel serta data sekunder mengetahui data-data yang dimiliki wajib pajak dan laporan-laporan serta dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang ada di kota Malang yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menggunakan sistem pemungutan *self assessment* yang dikenakan tarif pajak hotel sebesar 10% dan 5% untuk kategori rumah kos. Kendala yang terjadi di Kota Malang dikarenakan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik yaitu kekurangan pegawai dalam pendataan wajib pajak dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang yang tidak sesuai dengan kepatuhan membayar pajak dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010. Pemerintahan kota Malang berusaha melakukan strategi dengan cara penambahan satgas, dan juga telah berusaha melakukan sosialisasi dengan dilakukannya sosialisasi mendatangi event-event dan juga telah bekerjasama dengan media masa, serta pembentukan tim UPL (Unit Pelaksanaan Lapangan) Perpajakan Daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang.

Kata Kunci: Analisis,Sistem Pemungutan Pajak Hotel, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

SUMMARY

Amalia Dewi Indriyana, 2018, **Analysis of Implementation of Hotel Tax Collection System in Efforts to Increase Local Original Income** (Study at Local Tax Service Office of Malang), Latifah Hanum, SE, MSA, Ak, 152 Pages

Revenue Original Regional is the acceptance and levy of local taxes one of them by increasing the acceptance through the Hotel Tax. The implementation of the hotel tax collection system adopts the self assessment system adopted in Law No. 18 of 1987 and Law Number 34 Year 2000. This explains that the hotel tax in Law Number 28 Year 2009 Article 1 paragraph 20 and paragraph 1 are taxes on services provided by the hotel, and the hotel is a facility of lodging or lodging service providers including other related services with a fee.

This study aims to determine and analyze the application of tax collection system in the Office of Regional Tax Service Office of Malang. Knowing and analyzing the obstacles that exist in the implementation of hotel tax collection system and how to solve that done by the Tax Service Office of Malang City. And also researchers want to know the strategy undertaken by the Regional Tax Service Office of Malang City in an effort to increase the Original Revenue.

The type of research used in this study using the type of qualitative research with descriptive approach. Sources of data used are primary data in the form of data interviews and secondary data in the form of primary data that is interviewing employees of the Regional Tax Service Office and hotel taxpayers as well as secondary data to know the data owned by taxpayers and reports and documents.

The results of this study indicate that the application of the hotel tax collection system in Malang city applied by the Regional Tax Service Agency of Malang City using the self assessment system that imposed the hotel tax rate of 10% and 5% for the boardinghouse category. Constraints that occur in the city of Malang due to not fully realized well is the lack of employees in taxpayer data collection and also the lack of awareness of taxpayers in paying tax payable that is not in compliance with tax payments in Local Regulation No. 16 of 2010. Malang City Government trying to do strategy with the addition of task force, and also has tried to socialize with the socialization to the events and also has been working with the mass media, and the establishment of UPL (Field Implementation Team) Regional Taxation team to increase the original income in Malang.

Keywords: Analysis, Hotel Tax Collection System, Increase Local Original Income

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Kupersembahkan Karya Ilmiahku Untuk,
Papaku Mansur Abidin,
Mamaku Ida Jubaedah,
Dan Adikku Thahara Al Gifara*



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh sebagai syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

adanya bantuan, dukungan maupun dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Drs. Saparila Worokinasih S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Latifah Hanum, SE, MSA, Ak selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, arahan, bimbingan, ilmu, dan dukungan dalam terlaksananya skripsi ini hingga selesai;
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa Perpajakan termasuk Peneliti;
6. Seluruh pegawai Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang khususnya Ibu Surya Betasari selaku Kepala Sub Bagian Umum dan juga Bapak Nanang Swestinura,

S.Ab selaku Kepala Sub Bagian Pendaftaran di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang membantu dan memberikan ilmu dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini;

7. Orangtua, Adik maupun keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, motivasi, serta doa dan perhatian yang tak pernah berhenti diberikan demi kesuksesan peneliti;
8. Terimakasih untuk teman-temanku yang selalu menyemangatiku untuk selalu berjuang Regina dan Asep atas semua motivasi yang telah diberikan;
9. Videha, Vega, Randeka, Fahriza, Janis, Yuli, Rani, Dheny, Olan, Reza, Fajrin, Julio, Ivan, Bobby, yang telah setia untuk susah, sedih, senang, bahagia, menangis. Terimakasih atas kesabaran dan kalian telah menjadi keluarga kedua selama di perantauan;
10. Terimakasih untuk Perpajakan kelas A angkatan 2013 memberikan sebuah kenangan yang indah atas perjuangan, dan juga yang senantiasa memberikan dukungan dan menemani dimana pun penulis berada untuk menulis skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empris.....	14
B. Tinjauan Teoritis	18
1. Otonomi Daerah	18
2. Pendapatan Asli Daerah	20
3. Pajak Daerah	22
4. Pajak Hotel	26

5. Sistem Pemungutan pajak	28
6. Pengertian Teori Administrasi	33
C. Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Analisis Data.....	46
H. Keabsahan Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

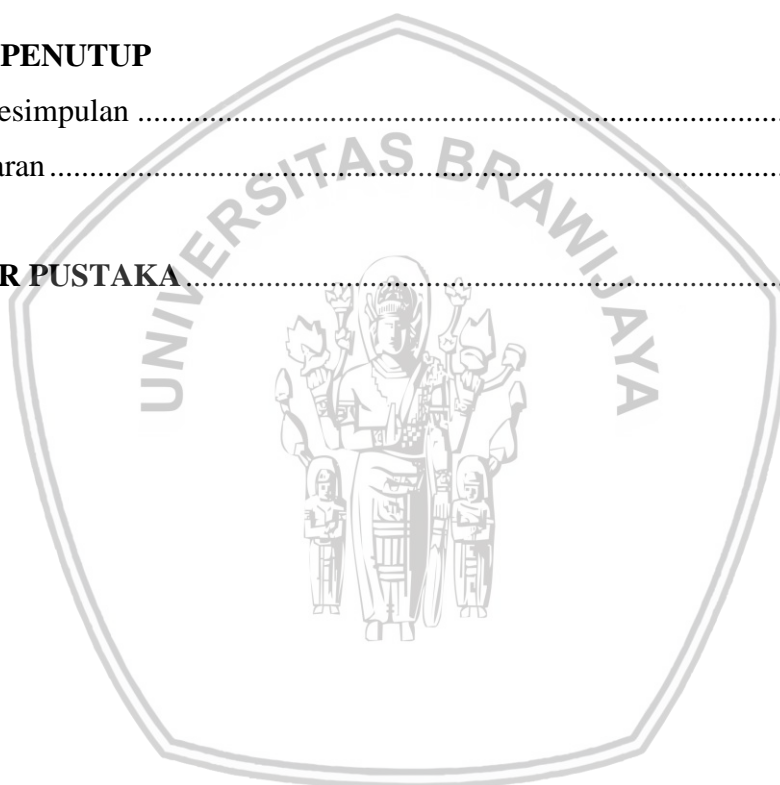
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	52
2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah.....	55
3. Lokasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.....	57
4. Visi dan Misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.....	58
5. Tujuan dan Sasaran	61
6. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah	59
7. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	67
B. Penyajian Data.....	74
1. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	75
2. Kendala yang Dihadapi Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel	85
3. Strategi yang Dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	89

C. Analisis dan Pembahasan	92
1. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	92
2. Kendala yang Dihadapi Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel	97
3. Strategi yang Dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016 di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.....	2
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2014-2016 di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.....	7
Tabel 1.3	Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kota Malang tahun 2014-2016.....	8
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan.....	17



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman	49
Gambar 4.1 Peta Kota Malang.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	114
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	125
Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2014	127
Lampiran 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2015	131
Lampiran 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2016	134
Lampiran 6 Dokumentasi.....	138
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ijin Penelitian	140
Lampiran 8 Peraturan Daerah Kota Malang.....	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu langkah bangsa Indonesia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara menerapkan suatu gerakan pembangunan yang juga disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pendapatan adalah diberlakukan kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001, membuat pemerintahan daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya dapat meningkatkan pelayanan publik dan dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) (Riady, 2010:2). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang Memiliki target dan realisasinya sendiri dalam penerimaan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Malang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dan pungutan pajak daerah dan retrebusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas – dinas dan penerimaan lain nya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah

(Prayoga:2016). Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha – usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2008). Sebagai pelaku ekonomi maupun sosial budaya, peran serta masyarakat menempati posisi tertinggi, dan karena itu perlu senantiasa dilibatkan dalam mendukung upaya menumbuhkan kemandirian daerah (Octavianto, 2009:1). Kota Malang memiliki target penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang Tahun 2014 – 2016 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang Tahun Anggaran 2014 – 2016

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp 347,817,577,770.96	Rp 372,545,396,292.03
2015	Rp 353,427,746,711.29	Rp 251,316,540,956.76
2016	Rp 382,418,229,000.34	Rp 477,338,468,000.43

Sumber: Laporan Realisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 2014 – 2016

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang mengalami fluktuasi. Hal ini, dilihat bahwa pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah di kota Malang berhasil mencapai Rp372,545,396,292.03. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp251,316,540,956.76. Selanjutnya, pada tahun 2016 realisasi pajak hotel kembali mengalami peningkatan sebesar Rp477,338,468,000.43. Meskipun dari sisi lain, dapat dijelaskan bahwa target penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini, menunjukan

bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu dikelola dengan baik, dimana yang menjadikan sumber terbesar dalam penerimaannya yaitu pajak daerah.

Undang – Undang No 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 11 yaitu Pajak Hotel yang didalamnya termasuk pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar adalah pajak hotel .

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siahaan ,2010:72). Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan / istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motel , gubuk pariwisata, losmen, rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih dari 10. Tarif pajak hotel yang dikenakan sebesar 10% sedangkan tarif pajak hotel kategori rumah kos sebesar 5%. Subyek pajak hotel adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (www.bppd.malangkota.go.id). Berdasarkan pemaparan tersebut, agar pengelolaan pajak hotel berjalan dengan baik, diperlukan sistem pemungutan pajak hotel yang baik pula.

Sistem pemungutan yang ada di Indonesia mengalami reformasi pajak atau disebut dengan *tax reform*, reformasi perpajakan Indonesia pertama kali dilakukan pada tanggal 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment system* ke sistem *Self Assessment system*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Diana Sari, 2013:7). *Tax reform* adalah pembaharuan perpajakan yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984. Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang hingga 1 Januari 1983 masih berlaku di Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia. Jadi, dengan pembaharuan perpajakan ini beban pajak akan menjadi adil dan wajar sehingga di satu pihak dapat mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh kedaan sedangkan di lain pihak dapat

menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak (Soemitro : 1988).

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, wajib pajak dan pemerintah untuk sama-sama menentukan besarnya pajak terutang ataupun diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk (Sukwiaty, 2004:53). Sejak tahun 1983, Pajak di Indonesia sendiri mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut sholikhah (2014) *self assessment system* adalah wajib pajak diberi kewenangan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang serta menyetorkan pajaknya kepada pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Sistem pemungutan pajak mempunyai tiga sistem yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding system*.

Penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia adalah *self assessment*. Penerapan sistem *self assessment* dianut dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1987 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2010:98). Wajib pajak hotel diberikan kepercayaan dalam menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutangnya. Dikatakan bahwa penerapan sistem pemungutan *self assessment* dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana karena wajib pajak menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada pihak ketiga yaitu Bank yang telah ditunjuk oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak hotel harus diimbangi dengan sistem yang baik, dengan adanya sistem pemungutan pajak hotel nantinya pemerintahan daerah dapat menggali potensi pajak hotel yang ada baik potensi pajak hotel yang sudah terdata maupun yang belum terdata di Kota Malang.

Kota Malang sebagai sebuah kota yang mulai berkembang besar pada masa penjajahan, Malang memiliki banyak bangunan peninggalan dengan usia sangat lama. Dahulu Kota Malang hanya memiliki beberapa hotel terbesar dan dikenal pada era tahun itu contohnya hotel Regents, hotel Pelangi, dan hotel Kartika namun saat ini Kota Malang telah memiliki banyak hotel, dan tercatat pada tahun 2016 jumlah hotel yang tersebar di wilayah Kota Malang sebanyak 165 Hotel (www.bps.go.id). Faktor yang mempengaruhi banyaknya hotel yang ada di Kota Malang karena berdekatan dengan kawasan wisata yang ada di daerah Kota Batu dan Kabupaten Malang, oleh karena itu Kota Malang sebagai tempat transit menuju tempata wisata tersebut. Selain itu, Kota Malang juga dikatakan sebagai kota pendidikan dimana banyak Univeritas terkenal yang ada di Kota Malang contohnya Universitas Brawijaya, Universitas Muhamadiyah Malang, Universitas Negeri Malang, sehingga menjadikan daya tarik mahasiswa untuk menetap di Kota Malang. Hal ini tentunya memberikan peluang besar bagi wirausahawan dalam menawarkan jasa penginapan bagi mahasiswa yaitu rumah kos. Menurut Solikah (2014) pembangunan rumah kos lebih dari 10 kamar saat ini sudah masuk dalam kategori jasa penginapan hotel.

Pemerintah Kota Malang memiliki target sendiri untuk pendapatan yang akan diterima dari pajak hotel. Target penerimaan pajak hotel di Kota Malang Tahun 2014 – 2016 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang Tahun Anggaran 2014 – 2016

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp17,169,937,368.68	Rp25,069,025,889.87
2015	Rp22,131,094,351.27	Rp31,828,508,228.43
2016	Rp27,680,570,300.00	37,857,637,844.26

Sumber: Laporan Realisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2014 – 2016

Pada tahun 2014, target penerimaan pajak hotel di Kota Malang sebesar Rp17,169,937,368.68 dan, realisasi nya berhasil mencapai Rp25,069,025,889.87. Sedangkan, Pada Tahun 2015 target sebesar Rp22,131,094,351.27 dan realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp31,828,508,228.43. Selanjutnya, pada tahun 2016 realisasi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp37,857,637,844.26 dari target penerimaan sebesar Rp27,680,570,300.00. Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 – 2016 target penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dan realisasi penerimaan pajak hotel juga mengalami peningkatan. Namun disisi lain, data mengenai jumlah wajib pajak hotel di Malang dari tahun 2014 – 2016 mengalami penurunan.

Berikut tabel data jumlah wajib pajak hotel di Kota Malang:

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kota Malang

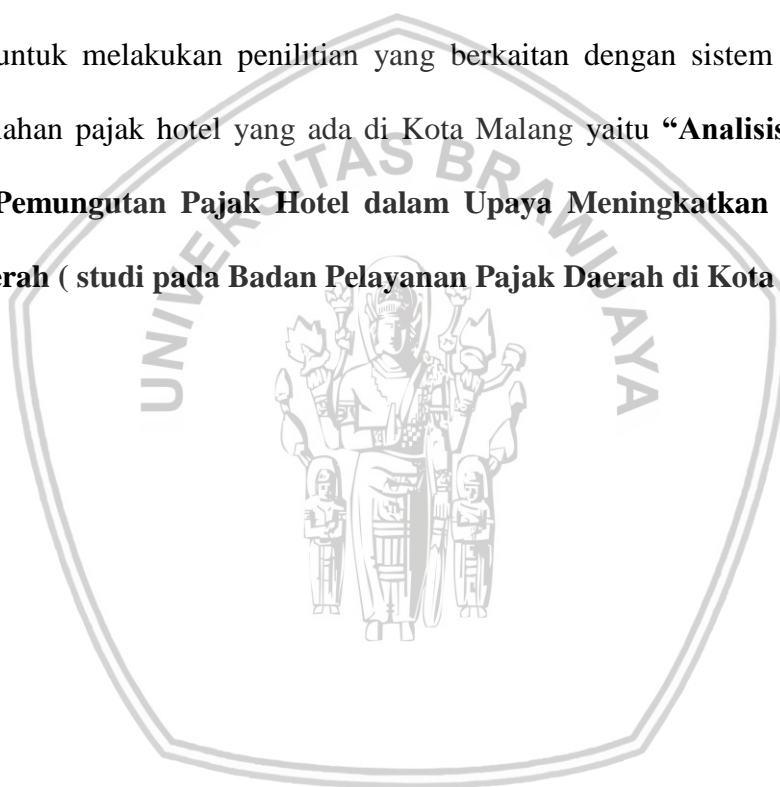
Tahun	Wajib Pajak
2014	133
2015	121
2016	90

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 2017

Fakta diatas menjelaskan bahwa terdapat peningkatan relisasi penerimaan pajak hotel sementara jumlah wajib pajak hotel yang ada di Kota Malang mengalami penurunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hotel yang harusnya dapat terdata dan dikelola dengan lebih maksimal, tetapi belum dapat dimaksimalkan dan masih banyak yang tidak tahu serta belum sadar cara melaporkan dan menyetor pajak hotel. Berdasarkan fenomena diatas menunjukan bahwa sistem pemungutan pajak hotel harus memiliki prosedur dan penerapan yang baik. Apabila sistem pemungutan pajak hotel tidak diberlakukan dengan baik maka akan mempengaruhi penurunan penerimaan pajak hotel. Selain itu, dapat mengakibatkan pengaruh dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah . Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemungutan pajak hotel yang dapat dengan mudah diterapkan di pemerintahan daerah Kota Malang agar realisasi penerimaan pajak hotel dapat tercapai dengan maksimal.

Beberapa penelitian, telah dilakukan dalam menguji sistem pemungutan pajak hotel. Menurut Prayoga (2016) dalam penelitiannya tentang Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan hasil penelitian semakin tinggi selisih yang diperoleh suatu nilai dalam potensi

pajak terhadap nilai realisasi pajak maka akan mengakibatkan semakin rendah nilai efektivitas pajak tersebut. Peneliti Sholikhah (2014) dalam penelitiannya tentang Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang, dengan hasil penelitian sistem pemungutan pajak hotel yang berpengaruh terhadap pendapatan penerimaan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui tentang strategi dan penerapan yang ada di kota Malang, Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pemungutan permasalahan pajak hotel yang ada di Kota Malang yaitu **“Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang dalam menerapkan sistem pemungutan pajak hotel dan cara menyelesaikannya ?
3. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut dapat dirumuskan tujuan dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ada dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel dan cara menyelesaikan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diterapkan dari penelitian ini :

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi sebagai acuan referensi bagi peneliti lain di masa mendatang yang berminat dan memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, Dapat memberikan informasi tentang penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang ada di Kota Malang. Serta sejauh mana pemerintah daerah Kota Malang dalam penerapan pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, informasi dan bahan pertimbangan bagi instansi dan masyarakat luas dalam menentukan kebijakan terkait penerapan pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

E. Sistematis Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dimana masing – masing bab memberikan pokok bahasan yang saling terkait dan tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi yaitu dasar penelitian, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan yang memberikan penjelasan singkat untuk masing – masing bab.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menganalisis data nantinya. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain teori sistem , sistem pemungutan pajak , pajak , pajak daerah, pajak hotel, teori administrasi pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian , serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dengan menyajikan data yang sesuai dengan penelitian serta menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan perumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari hasil dan pembahasan selama penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan guna perbikan dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian tentang sistem pemungutan pajak hotel yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan referensi penelitian selanjutnya. Penelitian menggunakan acuan referensi berikut beberapa penelitian terdahulu terkait tentang penerapan sistem pemungutan pajak hotel.

1. Memah (2013)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan referensi dengan judul penelitian Memah (2013) peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado” (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado) dengan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada

tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

2. Sholikah (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dengan penelitiannya berjudul “ Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang” (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dan Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos telah melengkapi prosedur, dokumen dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah, akan tetapi masih belum ada sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang. Oleh karena itu, sehingga menyebabkan adanya kesalahpahaman wajib pajak saat prosedur penyetoran yang mana seharusnya wajib pajak kembali ke Dinas Pendapatan Daerah guna melaporkan sudah melakukan pembayaran pajak hotel kategori rumah kos dan mendapat surat tanda setor yang resmi dari Dinas Pendapatan Daerah kota Malang akan tetapi mereka tidak kembali ke dinas pendapatan daerah untuk melapor.

3. Prayoga (2017)

Ketiga, peneliti menggunakan acuan refrensi dengan judul penelitian yang dengan judul “ Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel untuk

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi selisih yang diperoleh suatu nilai dalam potensi pajak terhadap nilai realisasi pajak maka akan mengakibatkan semakin rendah nilai efektivitas pajak tersebut. hal ini, menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2010-2014. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektifitas Pajak Hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2010 – 2014 bahkan nilai yang ada kurang dari 80% setiap tahunnya, nilai tersebut dapat dikatakan kurang efektif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada di Kota Malang seperti sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel hotel yang ada tersebut.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Persamaan		Perbedaan	
	Penelitian Terdahulu	Penelitian ini	Penelitian terdahulu	Penelitian ini
Memah (2013)	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1. Menganalisis penelitian tentang efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran	1. Menganalisis penelitian tentang sistem pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
Sholikhah (2014)	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Menganalisis penerapan sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Menganalisis sistem pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	1. Menganalisis penelitian tentang sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos	1. Menganalisis penelitian tentang sistem pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
Prayoga (2016)	1. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Menganalisis potensi sistem pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1. Menganalisis penelitian tentang potensi sistem pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	1. Menganalisis penelitian tentang sistem pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Sumber: data diolah penulis, 2018

B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis dibutuhkan oleh penelitian untuk menegaskan landasan teori yang dipilih dalam penelitian. Tinjauan teoritis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah

Kata otonomi tersebut berasal dari kata Yunani yaitu *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti hukum atau aturan. Adapun pengertian otonomi daerah menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan itu sendiri didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini tentunya diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber – sumber keuangan sendiri dan juga didukung oleh keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Menurut Kaho (1997) bahwa kemampuan daerah dalam bidang keuangan menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, karena kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat otonomi di suatu daerah.

Adapun prinsip - prinsip pemberian otonomi daerah itu sendiri sebagaimana pada UU Nomor 22 Tahun 2004, adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
- c. Otonomi daerah yang luas dan utuh tersebut diletakkan pada daerah kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara;
- e. Otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom;
- f. Otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif;
- g. Asas dekosentrasi diletakkan pada daerah provinsi;
- h. Tugas pembantuan dapat dari pemerintah pusat kepada daerah dan dapat juga dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaannya.

Sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah yaitu Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004, penyelenggaraan wewenang diikuti dengan penyerahan 3P (Personalia, Pembiayaan dan Prasarana/aset), berikut penjelasa di bawah ini:

- a. Personlia, penyerahan atau pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai daerah dimaksudkan dalam rangka mendukung tugas-tugas yang dibebankan kepada daerah sehingga secara teknis tugas-tugas yang

dilimpahkan tersebut tidak terhambat pelaksanaannya sebagai akibat dari tidak tersediaannya sumber daya manusia.

- b. Pembiayaan, dari aspek pembiayaan, pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Adapun yang menjadi komponen dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah antara lain sebagai berikut: Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Prasarana dan sarana (aset) untuk mendukung kewenangan yang dilimpahkan ke daerah, maka pemerintahan pusat juga menyerahkan berbagai aset sehingga menjadi aset daerah. Beberapa aset tersebut, antara lain berupa gedung – gedung kantor termasuk tanah dan sarana mobilitas. Namun tidak seluruh aset pusat diserahkan kepada daerah, antara lain tempat penginapan dari Departemen Pekerjaan Umum, dan Aset milik Departemen Perhubungan seperti bandara dan pelabuhan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Mengetahui definisi otonomi daerah diatas, selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui informasi mengenai sumber – sumber dari penerimaan daerah. Menurut Halim (2002:64) pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Yani (2002:240) berpendapat bahwa pendapatan merupakan

penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain – lain pendapata yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan (Siahaan, 2010:15). Yani (2002:39) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang dipungut oleh lembaga pemerintah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mendukung kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik. Menurut Yani (2002:15) sumber – sumber pendapatan daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan adanya sumber – sumber daerah yang berasal dari potensi daerah yang dikembangkan maka akan membuat pemerintah daeah berusaha untuk terus meningkatkan potensi yang ada didaerahnya.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Susanawati, Suparta, dan Hussaini :2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Suandi menyatakan, “Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah” (Suandy, 2011:37). Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis-Jenis dan Tarif Maksimal Pajak Daerah

Definisi diatas menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan

langsung. Selanjutnya, Pajak daerah memiliki sifat yang memaksa. Hal ini, dikarenakan pajak daerah didasari dengan adanya undang – undang dan nantinya pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setiap daerah memiliki jenis – jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing – masing daerah. Jenis – jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 adalah sebagai berikut:

1) Jenis Pajak Provinsi, adapun jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor,
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d) Pajak Air Permukaan, dan
- e) Pajak Rokok,

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel,
- b) Pajak Restoran,
- c) Pajak Hiburan,
- d) Pajak Reklame,
- e) Pajak Penerangan Jalan,
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g) Pajak Parkir,
- h) Pajak Air Tanah,
- i) Pajak Sarang Burung Walet,
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemungutan pajak harus bersifat potensial karena pajak digunakan untuk pembangunan perekonomian daerah di masa mendatang. Pemungutan pajak ditetapkan dengan peraturan daerah apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mobilitas yang cukup rendah serta hanya menyalani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 - d) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan atau obyek pajak pusat;
 - e) Potensinya memadai;
 - f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
 - g) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
 - h) Menjaga kelestarian lingkungan.
- Sumber (Siahaan, 2010:44)

Pemungutan pajak diserahkan ke daerah masing – masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. pajak yang dipungut oleh setiap daerah harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh undang – undang yang berlaku. Mardiasmo (2009:12) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut :

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ada tujuh jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dari ketujuh jenis pajak yang telah disebutkan salah satunya adalah pajak hotel yang merupakan salah satu pajak daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adanya jenis-jenis pajak yang telah disebut diatas tentu memiliki dasar-dasar pemungutan mengapa daerah perlu melakukan pemungutan atas pajak daerah. Dasar pemungutan pajak berkaitan dengan adanya penetapan tarif pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah.

Kurniawan (2010:79) menjelaskan mengenai ketentuan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang ketentuan tarif pajak Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tarif pajak untuk pajak Kabupaten/Kota.

Berikut adalah penetapan menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar:

- a) 10% untuk pajak hotel.
- b) 10% untuk pajak restoran.
- c) 75% untuk pajak hiburan.
- d) 25% untuk pajak reklame.
- e) 10% untuk pajak penerangan jalan.
- f) 20% untuk pajak parkir.
- g) 20% untuk pajak air tanah.
- h) 10% untuk pajak sarang burung walet.
- i) 5% untuk pajak BPHTB.
- j) 0,3% untuk pajak PBB Perdesaan Perkotaan.

Tarif tersebut adalah tarif maksimal atau tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pemungutan pajak daerah kabupaten/kota di wilayah masing – masing. Dari ketentuan penetapan tarif pajak diatas diharapkan pemerintahan daerah dapat menetapkan tarif pajak tersebut dengan maksimal. Dengan adanya tarif pajak yang dipungut tidak terlepas dari cara sistem pemungutan pajak itu sendiri.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah mempunyai tata cara tersendiri untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2009:15) pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak yang memenuhi wajib kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan dengan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan itu sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

4. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan ayat 1 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gouest house, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang menjadi obyek pajak, yaitu pembayaran atas tersedianya pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai berikut:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel (Siahaan, 2010:302)

Adanya objek pajak tidak terlepas dan adanya subyek pajak dan wajib pajak hotel. subyek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Siahaan, 2010:303). Hal ini, dapat didefinisikan bahwa subyek pajak merupakan konsumen yang

menggunakan atau menikmati fasilitas hotel dan konsumen tersebut membayar kepada orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan hotel atau yang memiliki usaha hotel tersebut. sedangkan yang disebut wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam lingkungan perkerjaannya membuka usaha di jasa penginapan (Siahaan, 2010:303).

Dasar pengenaan pajak hotel yakni berasal dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (Siahaan, 2010:304). Pembayaran yang dimaksudkan adalah pembayaran yang dibayarkan untuk penggantian atas pelayanan, fasilitas, dan jasa yang telah dipakai oleh subyek pajak (konsumen) dan apapun yang berkaitan dengan usaha hotel . pembayaran berupa uang yang berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh wajib pajak (pengusaha hotel).

Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi daerah sebesar 10% dari ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing – masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lain nya. Besarnya pokok pajak hotel yang teruang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{tarif pajak} \times \text{jumlah dasar pengenaan pajak} = \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel}$$

Sumber (Siahaan, 2010:305)

Pajak hotel terutang dipungut berdasarkan daerah dimana hotel tersebut berada. Cara pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dimungkinkan adanya kerjasama dalam proses pemungutan pajak, seperti percetakan formulir perpajakan, penerimaan surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data dan subjek pajak. Dalam proses kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan dalam penyetoran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan, 2010:310-311).

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya pajak hotel merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini, dapat dilihat bahwa pajak hotel dipungut oleh daerah dengan menerapkan peraturan daerah yang sesuai dengan Undang – Undang tentang pajak daerah. Tarif pajak hotel yang ditetapkan tidak boleh lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 10% dari pendapatan hotel dari setiap bulan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

a. Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut Moscovice yang dikutip oleh Baridwan (2012:4) menjelaskan sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian - bagian (disebut sub-sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2010:2). Menurut H.Kerzener yang dikutip oleh Arfan Ikhsan dan Prianthara (2009:12) menjelaskan sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human) yang diorganisir diatur sedemikian rupa sehingga komponen – komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Sutabari (2004:18) mendefinisikan sistem sebagai berikut:

Sistem adalah merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi secara berulang – ulang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu untuk menjadi lebih baik, oleh karena itu mencapai sebuah tujuan tersebut diperlukan suatu prosedur. Prosedur menurut Mulyadi (2010:5) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi, Sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan dimana sistem terdiri dari jaringan prosedur yang sudah dibuat dan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara berulang-ulang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu menjadi lebih baik.

b. Karakteristik Sistem

Sutabri (2012:13) menjelaskan bahwa sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Komponen Sistem (Components)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem.

2) Batasan Sistem (Boundary)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3) Lingkungan Luar Sistem (Environment)

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut.

4) Penghubung Sistem (Interface)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain.

5) Masukan Sistem (Input)

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input).

6) Keluaran Sistem (Output)

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi. Informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang menjadi input bagi subsistem lain.

7) Pengolah Sistem (Proses)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem ini mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen.

8) Sasaran sistem (Objective)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.

Sistem memiliki tiga karakteristik, seperti yang telah dijelaskan oleh Krismiaji (2005:1), yaitu:

- a) Komponen, sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan.
- b) Proses, yaitu suatu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem.

- c) Tujuan, yaitu sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.

b. Pengertian Sistem pemungutan Pajak

Pengertian sistem pemungutan pajak sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia adalah *Self Assessment*. Penerapan sistem *self assessment* dianut dalam peraturan Undang – Undang Nomer 18 tahun 1997 dan Undang – Undang Nomer 34 tahun 2000 (Siahaan, 2010:98). Menurut Kurniawan (2004:126) sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Pajak Daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut: .

- 1) Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment System*)

Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan, seperti karcis atau nota perhitungan. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- 2) Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*)

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi.

3) Mekanisme *with holding system*

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *with holding system* menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Teori Administrasi Pemerintahan

Administrasi (dalam terjemahan bahasa latin) adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya. Administrasi (terjemahan dalam bahasa inggris) adalah suatu kegiatan yang mempunyai makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu administrasi diartikan sebagai kegiatan tata usaha atau tulis menulis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemerintah yaitu suatu bentuk sistem

yang mengatur masyarakat dalam suatu Negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintah daerah merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas berupa pelayanan dan kegiatan tata usaha demi tercapainya tujuan daerah. pengertian lain administrasi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi (Ardiansyah 2015:111). Menurut Habibi (2015) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (propinsi, kabupaten dan kota). Sementara itu otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dasar pemikirannya adalah Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ardiansyah 2015:113).

C. Kerangka Pemikiran

Menurut pendapat Diana Sari (2013:7) perubahan sistem perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara petugas pajak dengan Wajib

Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek - praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Abimanyu (2013:15) menyatakan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Menurut Nasucha (2005:14) menjelaskan mengenai reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Tugas utama dari reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi. Selanjutnya, menurut Suparman (2007:1) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia adalah *self assessment* dianut dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1987 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2010:98). Tahun 1987 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2010:98).

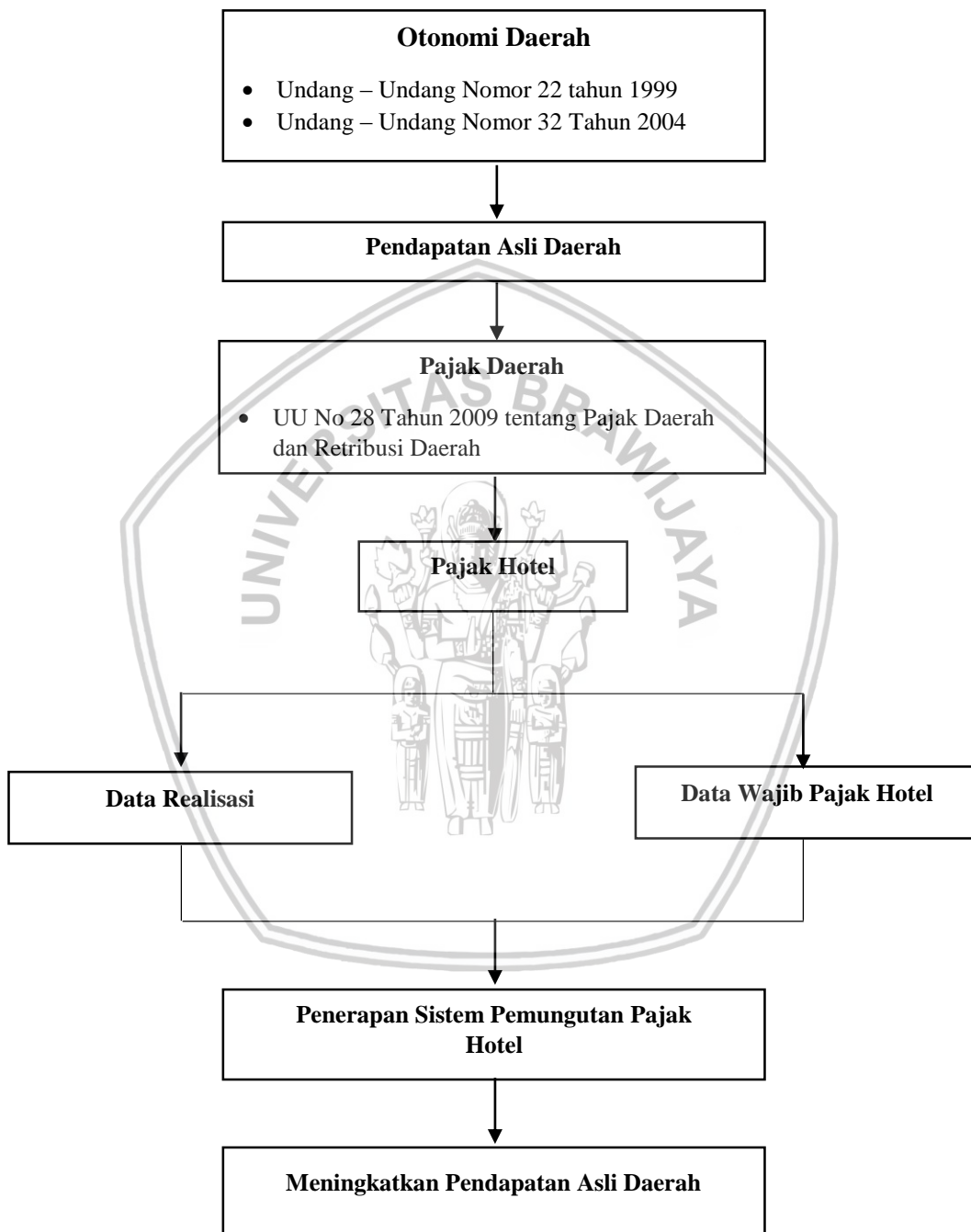
Wajib pajak hotel diberikan kepercayaan dalam menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutanganya. Khususnya wajib pajak yang ada di Kota Malang karena memiliki potensi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang mengalami fluktuasi. Pendapatan Asli Daerah memiliki sumber - sumber penerimaan pendapatan yang besar dari pajak daerah salah satunya nya pajak hotel Yani (2002:39). Pajak hotel di Kota Malang memiliki target dan realisasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Namun disisi lain, wajib pajak yang ada di Kota Malang mengalami penurunan disetiap tahun. Hal ini, berpengaruh dalam peranan penerapan sistem pemungutan pajak hotel. Selanjutnya, apabila dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel tidak diberlakukan dengan baik maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Dikatakan bahwa penerapan sistem pemungutan *self assessment* dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana karena wajib pajak menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada pihak ketiga yaitu Bank yang telah ditunjuk oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Hal ini, menunjukan penelitian melakukan analisis dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang dilakukan pemerintah daerah guna mengetahui kinerja pegawai atas pertanggung jawaban. Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Berikut dapat dilihat dari gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengertian deskriptif menurut Husman dan Purnomo (2009:129), “menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan kata-kata”. sedangkan menurut Sugiyono (2015:15) Pengertian metode kualitatif adalah sebagai berikut:

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Pendekatan deskriptif adalah Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur,2007.108). Sedangkan menurut Husman dan Purnomo (2009:129), pengertian deskriptif “menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan kata-kata”. Jenis penelitian ini akan mampu memberikan sebuah gambaran mengenai penerapan Sistem

Pemungutan Pajak Hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang secara sistematis, faktual dan akurat dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud dan menganalisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Penelitian jenis deskriptif ini tidak perlu untuk mencari atau menerangkan korelasi dan pengaruh serta tidak perlu menguji sebuah hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat suatu perbandingan.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah di dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mempertajam sebuah penelitian (Sugiyono, 2015:286). Fokus penelitian adalah hal yang dapat dijadikan sebuah pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk diteliti. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak terlalu luas, serta relevan dengan objek penelitian sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dilihat dari:

- a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel.
 - b. Tarif penetapan pajak hotel.
 - c. Dokumen yang digunakan pajak hotel.
2. Kendala dalam sistem pemungutan pajak hotel yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dilihat dari:
 - a. Tingkat kesadaran wajib pajak hotel dalam mentaati pajak hotel.
 - b. Jumlah personil atau pegawai dalam mencatat wajib pajak hotel.
3. Strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Strategi sistem dalam penerapan pemungutan pajak hotel.
 - b. Strategi pembentukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1, JL. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang. Alasan pemilihan tempat penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dikarenakan kantor dengan predikat terbaik, dan kantor ini membawahi wilayah yang cukup luas sehingga berpotensi memiliki wajib pajak yang luas pula. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih terdapat wajib pajak yang memiliki utang pajak sehingga masih perlu untuk mengetahui

pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Situs penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti mengambil dan mendapatkan informasi atau sebuah data untuk penelitiannya. Yang dimaksud Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlakukan. Situs penelitian ini dilakukan yaitu pada bidang perbendaharaan, bidang bagian umum sekretariat, akuntansi, dan pendapatan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh peneliti dan dari sumber tersebut dapat memberikan sebuah informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Arikunto (2010:189) menjelaskan bahwa sumber data seperti benda, gerak, manusia, dan sebagainya dalam suatu penelitian adalah subjek penelitian dimana data menempel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:208) menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Purhantara (2010:79) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrumen

yang langsung ditetapkan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017 di Kantor Terpadu Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan beberapa pegawai secara langsung yang bertanggung jawab terhadap penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yaitu:

- a. Kepala Subag Seketaris Umum di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
- b. Kepala Subid Pendaftaran di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Selain peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang sebagai informan. Penelitian ini juga membutuhkan sebuah data dan wawancara sebagai perbandingan dengan melakukan sesi wawancara dengan beberapa wajib pajak hotel yang ada di Kota Malang.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:308) menyatakan bahwa sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen maupun literatur. Sedangkan menurut Purhantara (2010:79) menjelaskan data sekunder adalah data atau sebuah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data sekunder dalam penelitian ini dapat

berupa struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Malang, buku-buku yang terkait, arsip Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara atau langkah yang sangat penting untuk dilakukan di dalam sebuah penelitian, dengan melakukan sebuah langkah tersebut akan memperoleh data secara rinci dan dapat bersifat objektif atau dapat dikatakan rinci. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Menurut Narbuko (2010:83) menyatakan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka, serta mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang ada. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang akan dilakukan kepada Ketua Bidang Umum di Badan Pelayanan Pajak Daerah, Ketua Bidang Pendaftaran di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah suatu catatan atau bahan yang menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi atau dapat dikatakan pengumpulan dari data sekunder yang didapat dari arsip suatu instansi yang bersangkutan serta dilakukan analisis. Menurut Sugiyono (2015:329) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sedangkan menurut Fuad dan Nugroho (2014:61) menyatakan bahwa dokumentasi adalah salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian seperti bahan tertulis, gambar, dan foto yang digunakan karena permintaan seorang peneliti. Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari narasumber.

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan seperti data yang diterbitkan oleh instansi yang menjadi objek penelitian sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dalam bentuk gambar, tabel, ataupun diagram yang sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus penelitian yaitu Laporan Target Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang, Laporan Target Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang, data gambar struktur organisasi pegawai di Badan Pelayanan Daerah Kota Malang, Visi dan Misi. Sumber data diperoleh dari Bidang

Sekretariat atau Bagian Umum dan Bidang Bagian Pendaftaran di Badan Pelayanan Pajak Daerah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, artinya peneliti perlu sepenuhnya memahami dan adaptif terhadap situasi sosial dalam kegiatan peneliti itu. Berhubungan instrument penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti terjun langsung ke lapangan dengan membawa diri sendiri untuk menghimpun sebanyak mungkin data dengan membawa alat bantu yang diperlukan oleh peneliti (Arikunto, 2010:270).

1. Pedoman Wawancara

Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai kerangka pemikiran utama dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kemudian ditulis dalam pedoman wawancara. Peneliti akan memberikan pertanyaan yang ada didalam pedoman wawancara sebagai informan dituju kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dan juga wajib pajak hotel yang ada di kota Malang. Pada saat melakukan sebuah wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti mengajukan pertanyaan improvisasi sehingga memperoleh data-data yang diperlukan dan juga mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang dialami petugas pajak saat menemukan data yang tidak sesuai. Informan yang diberikan

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan suatu pedoman yang memuat secara garis besar atau kategori yang dibutuhkan oleh peneliti. Pedoman dokumen digunakan agar peneliti dengan mudah memperoleh data yang akan dianalisis, sistematis serta sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2001:335) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun peneliti lainnya. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2013:335) aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* dan koleksi data. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan dalam analisis data:

1. Koleksi Data

Dalam penelitian ini studi pendahuluan dilakukan peneliti melalui pengamatan atau observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pihak-pihak pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Barat untuk mendapatkan informasi dan mencari referensi-referensi yang

mendukung penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dalam periode tertentu, hal ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti mempunyai dasar atau landasan fokus dan rumusan masalah.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian maka jangka waktu tidak dapat ditentukan dengan membutuhkan waktu yang sebentar atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Semakin lama peneliti berada pada situs penelitian maka semakin banyak data yang didapatkan oleh peneliti sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok dan dianggap penting serta memilah sesuatu data antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Hal tersebut akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap data dan memperoleh data yang dibutuhkan selanjutnya. Data yang direduksi adalah hasil wawancara dengan para informan terkait yaitu pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang bertugas pada bidang Perbendaharaan, bidang bagian umum Sekretariat, bidang bagian Akuntansi dan bidang Pendapatan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi, maka tahapan berikutnya yaitu peneliti akan melakukan penyajian data. Peneliti menggunakan tahapan ini untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kerja yang selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian

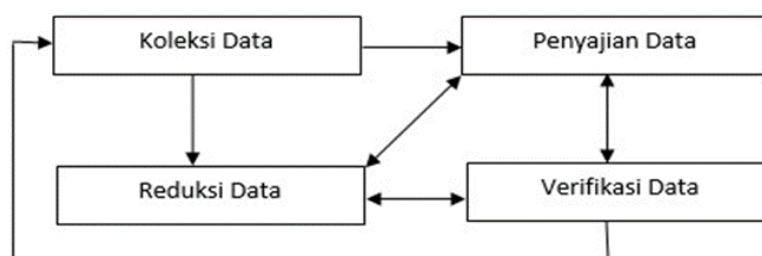
kualitatif dapat berupa grafik, matrik, uraian singkat atau naratif, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data tersebut, maka penyajian data dapat terorganisasikan dengan baik, tersusun secara teratur dan rapih sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Menurut Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*, artinya yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conculusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Setelah tahap penyajian data, maka tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan yang terakhir dalam model interaktif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid, dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan dapat dipercaya atau kredible. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah ataupun sebaliknya. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif memiliki sifat sementara sehingga dapat berubah ataupun berkembang setelah melakukan penelitian selanjutnya. Adapun langkah-langkah anlisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan melihat prosedur kerja pada seksi-seksi yang berkaitan, sehingga akan terlihat Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah sesuai atau tidak dengan prosedur yang berlaku.
- b. Menganalisis cara penyelesaian kendala yang ada dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sehingga akan terlihat apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
- Berikut gambar Analisis data menurut Miles dan Huberman:

Gambar 3.1 : Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono (2014:247) telah diolah kembali.

H. Keabsahan Data

1. Uji Validasi Data

Setiap seorang peneliti harus memperhatikan aspek validitas dan reabilitas dalam penelitian untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut tersebut sudah valid atau sebaliknya. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reabilitas dinamakan kredibilitas. Menurut Sugiyono (2015:368) menyatakan bahwa “uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check”.

2. Teknik Triangulasi

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data atau menguji keabsahan data. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain dari data tersebut untuk keperluan pembandingan ataupun pengecekan. Triangulasi Teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya

berbeda-beda. Menurut Denzin dalam Moleong (2012:330), “Triangulasi dibedakan menjadi 4 macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data atau metode, triangulasi peneliti atau penyidik, dan triangulasi teori”. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang berbanding terbalik dengan triangulasi teknik. Menurut Patton dalam Meleong (2012:330), “triangulasi sumber berarti mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Dalam triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa cara salah satunya yaitu membandingkan data dari hasil dari wawancara secara langsung dengan suatu dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, dibandingkan dengan dokumen yang berkaitan untuk memeriksa apakah data tersebut valid atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

-

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar di Jawa Timur setelah Kota Surabaya (berjarak 90 km dari Surabaya), dikelilingi wilayah Kabupaten Malang dan disebelah barat perbatasan dengan Kota Batu. Malang merupakan kota yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, terletak pada $112^{\circ} 34'9'' - 112^{\circ} 41'34''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 54'2'' - 8^{\circ} 3'5''$ Lintang Selatan di ketinggian antara 400 -667 meter diatas permukaan laut (dpl). Berdasarkan letak tersebut, Kota Malang memiliki udara sejuk dengan suhu rata – rata $24,13^{\circ}\text{C}$ dengan kelembapan udara 72% serta curah hujan rata – rata 1.883 milimite pertahun, sehingga Kota Malang memiliki udara yang sejuk dan asri. Selanjutnya, dengan adanya kondisi tersebut yang ditunjang dengan pemandangan alamnya yang indah dan bersih membuat Kota Malang menjadi salah satu tempat untuk bersinggah. Selain itu, Kota Malang juga dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan dan banyak memilih Kota Malang sebagai tempat menuntut ilmu.

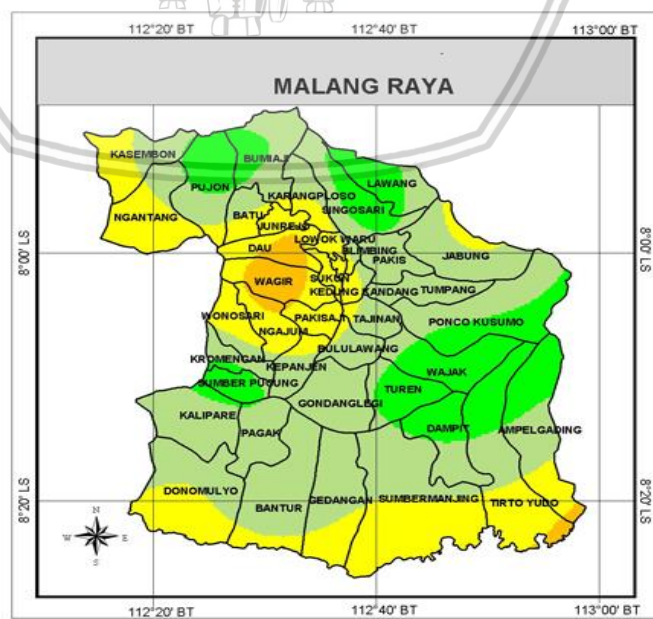
Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan memiliki karakter geografis yang berada didataran tinggi, daerah yang berhawa sejuk yang menjadikan Kota Malang sangat mendukung sebagai Kota

pendidikan. Kota Malang memiliki beberapa Universitas Negeri dan Swasta seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta Universitas Swasta yaitu Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhamadiyah Malang. Sehingga, banyak dari mahasiswa yang berasal dari luar daerah Kota Malang yang menyewa tempat tinggal sementara untuk beberapa waktu kedepan, dan juga banyak wisatawan asing atau lokal untuk mencari tempat tinggal sementara untuk transit mengunjungi ke daerah wisata yang ada di Kota Batu.

a. Batas Wilayah

Berikut adalah gambar peta kota Malang, Batas-batas wilayah Kota Malang dapat dilihat melalui peta wilayah Malang Raya di bawah ini:

Gambar 4.1: Peta Kota Malang



Sumber: Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang.

Sebelah Utara	: Kecamatan Singosari dan Karangploso
Sebelah Selatan	: Kecamatan Tajinan dan Pakisaji
Sebelah Timur	: Kecamatan Pakis dan Tumpang
SebelahBarat	: Kecamatan Wagir dan Dau

b. Wilayah Administratif

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Blimbing, terdiri dari 11 Kelurahan yaitu Kelurahan Bale Arjosari, Kelurahan Arjosari, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Ksatrian, Kelurahan Polehan, dan Kelurahan Jodipan.
- 2) Kecamatan Klojen, terdiri dari 11 Kelurahan yaitu Kelurahan Rampalcelaket, Kelurahan Kidul Dalem, Kelurahan Kasin, Kelurahan Kauman, Kelurahan Samaan, Kelurahan Klojen, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Bareng, dan Kelurahan Gading Kasri.
- 3) Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari 12 Kelurahan yaitu Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Tunggulwulung, dan Kelurahan Mojolangu.

- 4) Kecamatan Sukun, terdiri dari 11 Kelurahan yaitu Kelurahan Sukun, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Bandulan, Kelurahan Karangbesuki, Kelurahan Bakalankrajan, Kelurahan Mulyorejo, dan Kelurahan Tanjungejo.
- 5) Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 Kelurahan yaitu Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Arjowinangun, dan Kelurahan Tlogowaru.

2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4 Undang-undang tanggal 1 Januari 1970. Dinas pendapatan daerah kota malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 merupakan pelaksana otonom daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Dinas pendapatan kota malang merupakan pajak kota antara lain: (1) Pajak Hotel yang didalamnya termasuk pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5)

Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kemudian per 1 Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berganti nama menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, berdasarkan Peraturan Daerah bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah.

3. Lokasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Lokasi yang terletak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang di selatan kota Malang. Akses yang ditempuh ke tempat cukup strategis dan juga mudah dijangkau dengan kendaraan yang ada di pusat kota. Berlokasi di Perkantoran Terpadu Gedung B lantai 1 di Jl. Mayjend Sungkono kelurahan Arjowinangun kecamatan Kedungkandang, kota Malang. No Telp yang dapat dihubungi Sekretariat 0341751532 Pelayanan Pajak Daerah no fax 0341299318 Email : bppd@malangkota.go.id.

4. Visi dan Misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

a. Visi

Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan (SKPD) adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi harus jelas yang menunjukkan cita-cita layanan yang terbaik. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya asing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari *stakeholder*, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka

dirumuskan visi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai berikut:

**Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kesejahteraan
Masyarakat Kota**

Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yaitu:

1) Meningkatkan

Adalah suatu kegiatan atau aktifitas pelaksanaan tugas dari fiskus yang menunjukkan sesuatu yang lebih baik.

2) Pajak Daerah

Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3) Kesejahteraan

Adalah kondisi yang baik dan makmur yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah Kota Malang dimana pendanaan untuk mewujudkan hal tersebut penyokong utamanya adalah dibiayai oleh penerimaan daerah berupa Pajak Daerah.

4) Masyarakat Kota

Adalah sebuah komunitas yang interdependen yang berinteraksi dan saling tergantung satu dengan lainnya pada daerah perkotaan

Visi diatas mengandung maksud untuk menciptakan suatu kinerja yang optimal pada masing-masing fiskus agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para wajib pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Disamping itu juga melekat pada tujuan pembangunan daerah Kota Malang pada tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dirumuskan sebagai berikut:

Misi : Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

Tugas dan fungsi utama Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan arahan misi yang diemban menjadi sangat strategis guna mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah.

5. Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Pajak Daerah

Sejalan dengan Misi yang diemban Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah
- c. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pelayanan

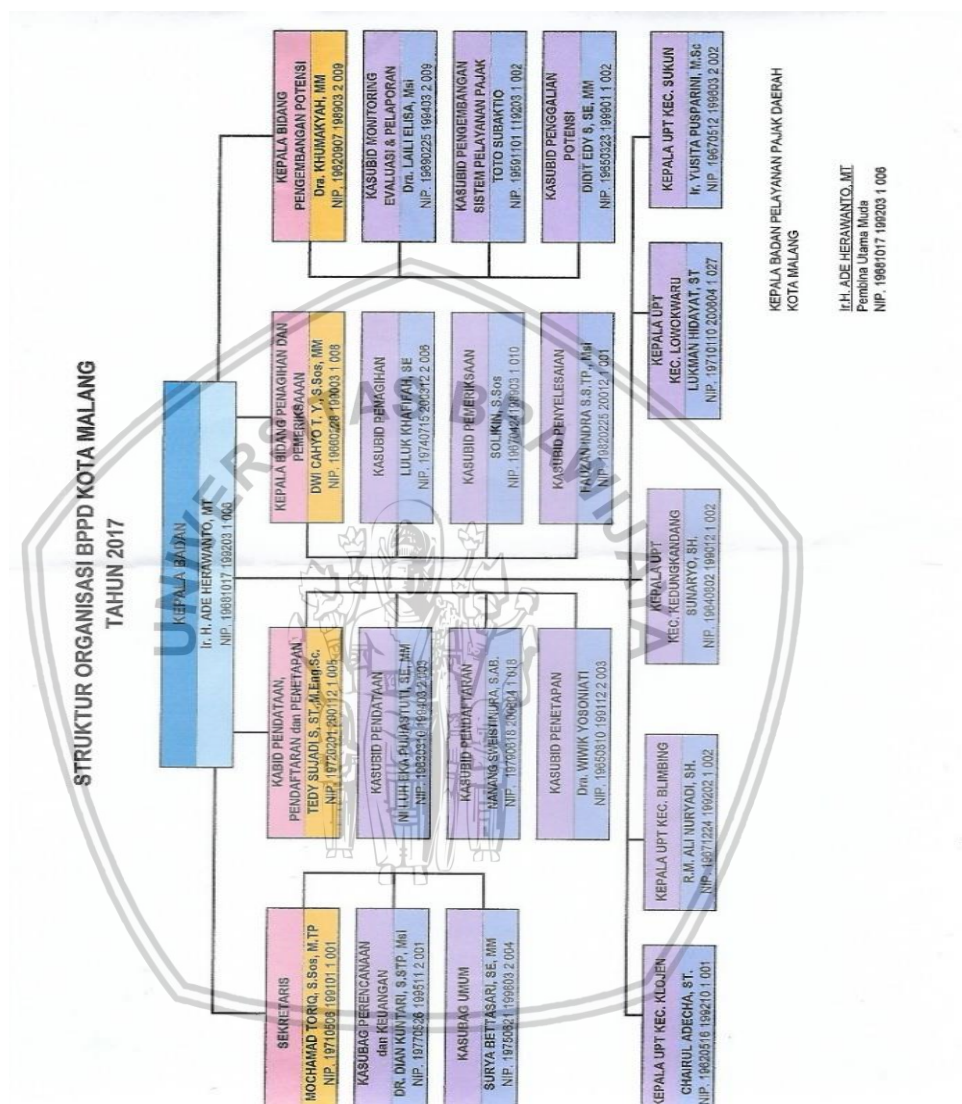
Pajak Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. sasaran-sasaran tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- c. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja.

6. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah

Badan Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari beberapa bidang dan masing-masing bidang membawahi beberapa sub bidang. Bidang Pajak daerah lainnya membawahi Sub Bidang Pendaftaran, Sub Bidang Pendataan, Sub Bidang Penetapan. Selanjutnya Sub Bidang Penagihan, Sub Bidang Pemeriksaan, dan Sub Bidang Penyelesaian. Bidang Pengembangan Potensi, Sub Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak, Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dan Sub Bagian Penggalan Potensi.

Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2018

Uraian dari tugas dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi yang ada adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala badan memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas Melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan keperpustakaan serta kearsipan. Adapun fungsi yang dimiliki sekretaris sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
- 6) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keperpustakaan.
- 7) Pengelolaan urusan rumah tangga.

Sekretaris membawahi 2 sub bagian yaitu :

- 1) Sub bagian umum, bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan.
- 2) Sub bagian perencanaan dan keuangan, bertugas dalam pengelolaan anggaran dan administrasi.

c. Bidang pajak daerah lainnya

Bidang pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok pelayanan, pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan BPHTB dan pajak daerah lainnya. Adapun fungsi yang dimiliki oleh bidang pajak daerah lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian.
- 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- 4) Pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendataan, penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya.

Bidang pajak daerah lainnya membawahi 3 seksi

yaitu:

- 1) seksi pendataan, Memiliki tugas mendata obyek dan wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- 2) Seksi pendaftaran melaksanakan tugas pokok pendaftaran obyek dan wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- 3) Seksi penetapan melaksanakan tugas pokok perhitungan dan penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya.

d. Bidang penagihan

Bidang penagihan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penagihan PBB Perkotaan dan pajak daerah lainnya di kota malang.

Fungsi yang dimiliki bidang penagihan diantaranya:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan.
- 2) Pelaksanaan penagihan PBB Perkotaan dan pajak daerah lainnya.
- 3) Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya.

Penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

Bidang penagihan dibagi menjadi 3 seksi yaitu:

- 1) seksi penagihan pajak bumi dan bangunan bertugas melakukan penagihan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan.
- 2) Seksi pengihan pajak daerah lainnya mempunyai tugas melakukan penagihan atas tunggakan BPHTB dan pajak daerah lainnya.

- 3) Seksi penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok yaitu menyelesaikan keberatan atas BPHTB dan pajak daerah lainnya.

d. Bidang pembukuan dan pengembangan potensi

Bidang pembukuan dan pengembangan potensi bertugas melakukan pembukuan dan pelaporan pengelolaan benda berharga dan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya. Adapun fungsi yang dimiliki oleh bidang pembukuan dan pengembangan potensi ialah :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembukuan dan pengembangan potensi.
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembukuan, pelaporan, pengelolaan benda berharga dan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembukuan dan pengembangan potensi.
- 4) Pengumpulan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah.
- 5) Pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

Bidang pembukuan dan pengembangan potensi membawahi 3 seksi yaitu:

- 1) Seksi pembukuan dan pelaporan, memiliki tugas membuat pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut.
- 2) Seksi Pengelolaan benda berharga, memiliki tugas dalam pengelolaan benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- 3) Seksi pengembangan potensi melakukan tugas pokok pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

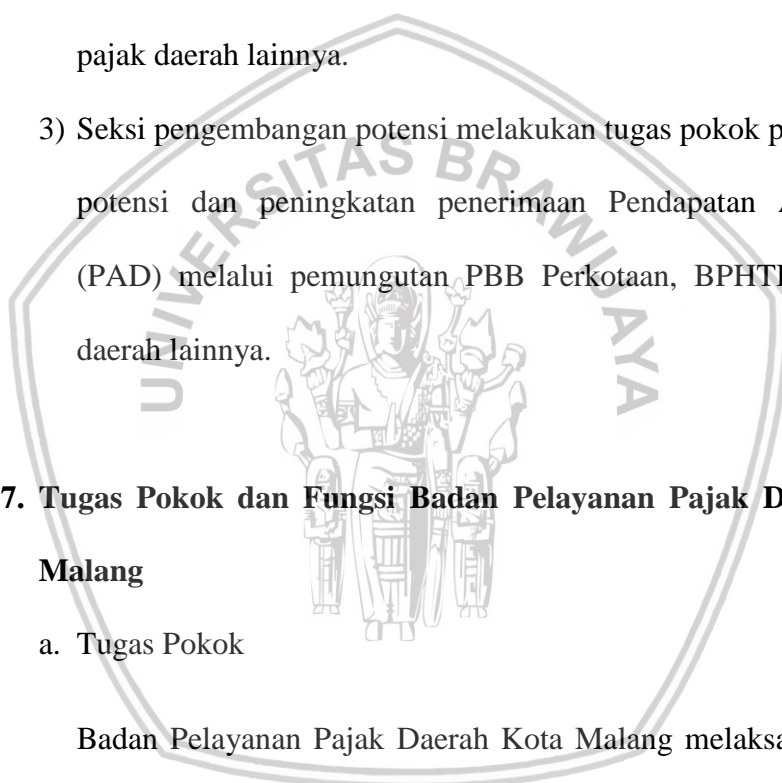
a. Tugas Pokok

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah.

b. Fungsi

Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;



- 2) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 3) pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 4) penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 5) penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 6) pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 7) pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 8) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- 9) pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- 10) pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- 11) pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

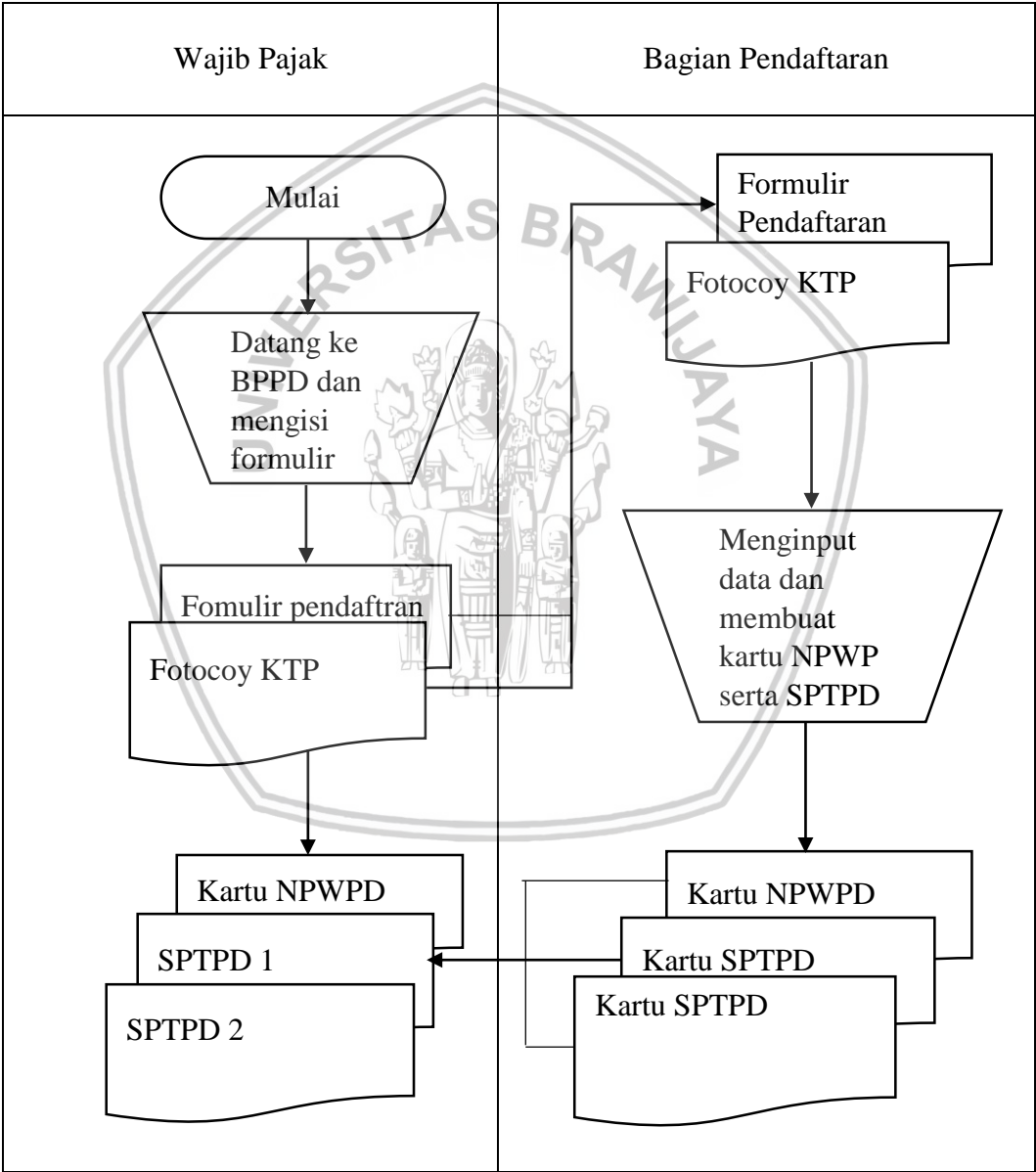
- 12) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 13) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 15) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 16) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 17) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- 18) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 19) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 20) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 21) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;

- 22) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 23) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 24) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 25) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.



Berikut tabel Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai alur dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang ada di Kota Malang:

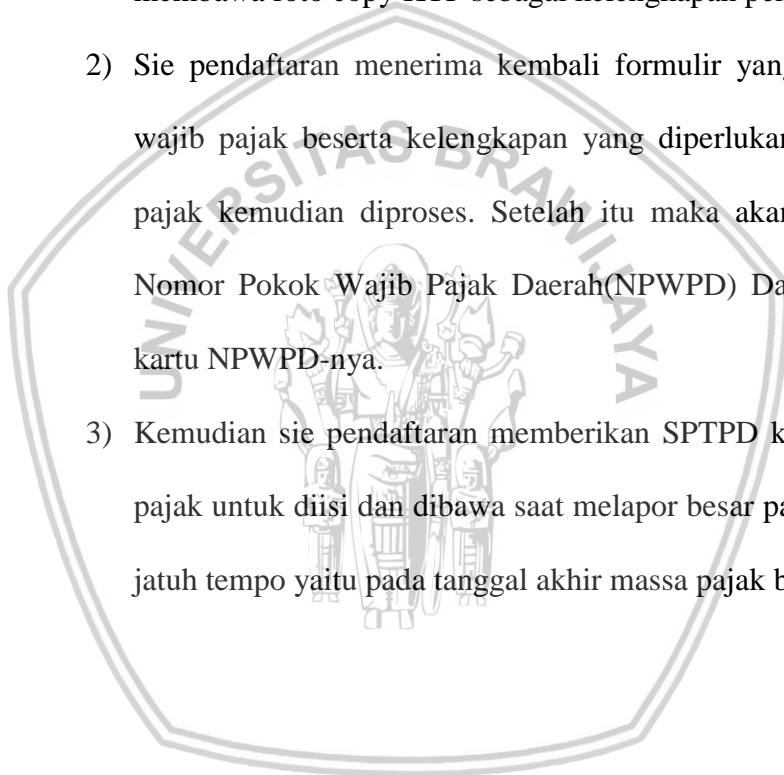
Tabel 4.1 Pendaftaran Wajib Pajak Hotel



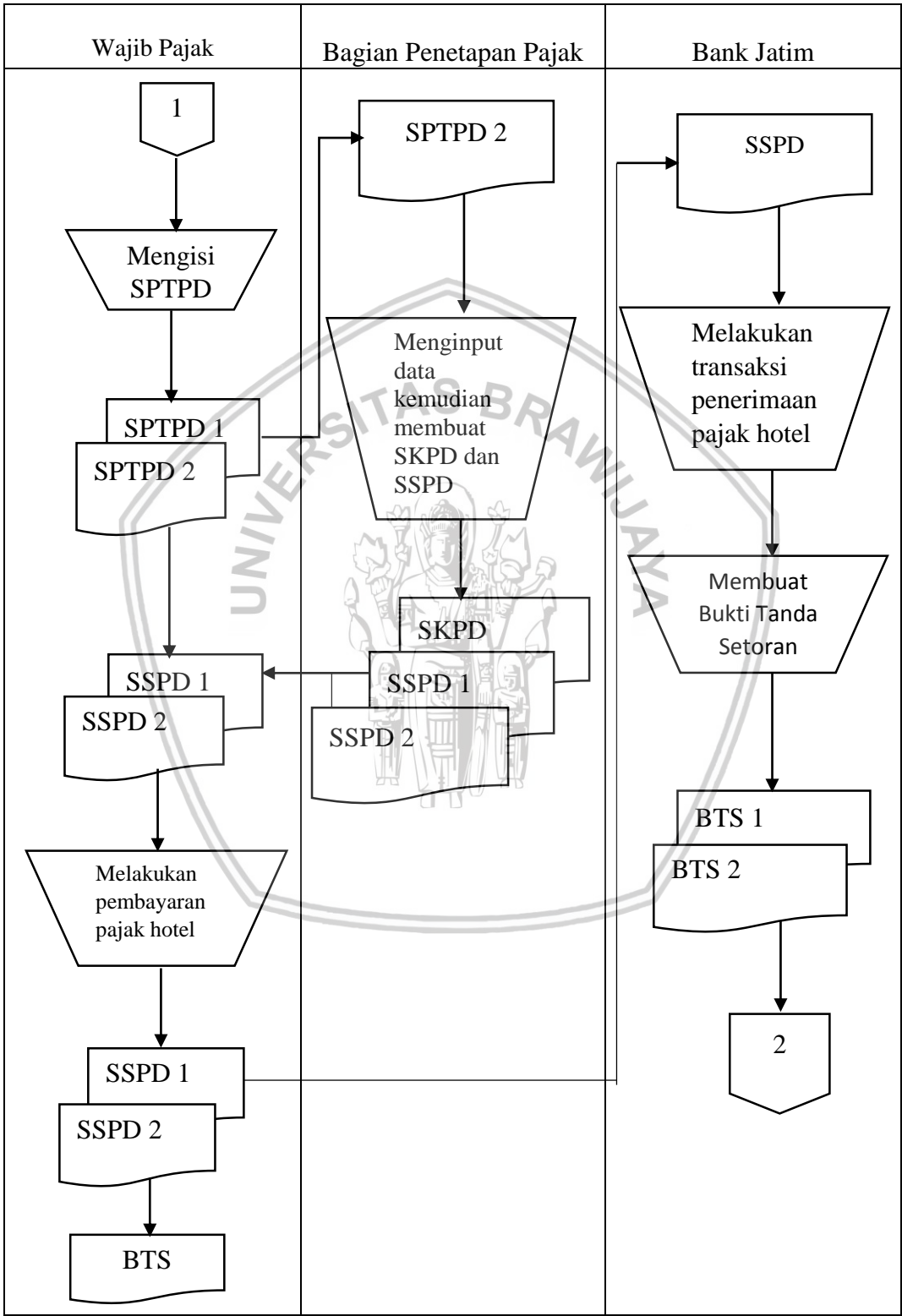
Sumber : Data diolah peneliti

Dari tabel yang ada di atas dapat dijelaskan bahwa alur tersebut terdiri dari Prosedur dalam penerapan pemungutan pajak hotel:

- 1) Wajib pajak hotel yang sesuai dengan kriteria diminta datang ke Badan Pelayanan Pajak Daerah untuk mendaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran serta membawa foto copy KTP sebagai kelengkapan pendaftaran.
- 2) Sie pendaftaran menerima kembali formulir yang telah diisi wajib pajak beserta kelengkapan yang diperlukan dari wajib pajak kemudian diproses. Setelah itu maka akan ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Dan dibuatkan kartu NPWPD-nya.
- 3) Kemudian sie pendaftaran memberikan SPTPD kepada wajib pajak untuk diisi dan dibawa saat melapor besar pajak kos saat jatuh tempo yaitu pada tanggal akhir masa pajak berikutnya.



Tabel 4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Hotel



Sumber : Data diolah peneliti

Berikut adalah penjelasan prosedur penyetoran pajak hotel di Kota Malang:

- 1) Sie penetapan pajak akan menerima SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak.
- 2) Setelah membuat SKPD bagian penetapan akan membuat SSPD rangkap 2 yang akan diberikan kepada (1) wajib pajak (2) Bank Jatim, sedangkan SKPD akan diarsipkan di bagian penetapan.
- 3) Wajib pajak menerima SSPD yang kemudian melakukan pembayaran pajak hotel kategori rumah kos di Bank Jatim.
- 4) SSPD akan diberikan kepada Bank Jatim beserta jumlah pajak terutang yang tertera di SSPD, kemudian Bank Jatim akan membuat Bukti Tanda Setor (BTS) rangkap 2 yang akan diberikan kepada (1) wajib pajak (2) Bank Jatim.
- 5) Dengan Bukti Tanda Setor wajib pajak kembali ke bagian penetapan dan menunjukkan BTS .
- 6) Bagian penetapan akan menginput BTS yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Hasil inputan BTS akan diterima oleh bagian pembukuan dan pelaporan melalui aplikasi simpada.
- 7) Bagian pembukuan dan pelaporan yang menerima inputan BTS akan membuat bukti setor pajak yang kemudian diberikan kepada wajib pajak.

B. Penyajian Data

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mengenai analisis penerapan sistem pemungutan pajak hotel dalam upaya meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang, maka hasil dan pembahasan yang disajikan mencakup penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang, kendala-kendala dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel Kota Malang, serta strategi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

a. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak

Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, yaitu pajak Kabupaten/Kota yang pajak nya dipungut oleh pemerintahan kota dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerah berdasarkan golongan, pajak hotel digolongkan sebagai pajak langsung karena pajak ini menjadi tanggungan pribadi oleh wajib pajak hotel yang tidak dibebankan ke orang atau pihak lain.

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang dimiliki peraturan yang mengatur tentang pajak hotel, dalam melakukan pungutan pajak hotel yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang No.16 tahun 2010 tentang subjek pajak hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran atas pelayanan hotel. Sementara itu pengertian tentang wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan, sedangkan yang termasuk objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam proses pemungutan pajaknya antara lain: percetakan formulir perpajakan, pengirim surat-surat kepada wajib pajak, atau pengimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasn penyetoran pajak dan penagihan pajak. Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan surat

pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam pelaksanaan penerapan sistem pemungutan ini petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang hanya mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak, Hal ini ditegaskan oleh Ibu Betta :

“jadi begini yah mba.. penerapan pemungutan pajak di Kota Malang menurut saya sendiri sudah menerapkan dengan baik dengan program pajak online namanya e-tax, jadi.. di permudah dalam pemungutan pajak daerah, masih sama seperti dahulu kok, menggunakan *self assessment*. Caranya untuk mendaftarkan yah mba, hmm.. pertama ya mba... wajib pajak wajib mendaftarkan dengan membawa beberapa persyaratan, lalu wajib pajak mengisi formulir pendaftaran, formulir pendaftaran itu salah satu syaratnya adalah harus dilengkapi dengan persetujuan ijin usaha, ijin gangguan, fotokopi KTP pemilik hotelnya, setelah dia ngisi formulirnya itu baru dia bisa dikenakan pajak, nah habis itu... dikenakan pajak sesuai dengan omset pajak hotel nya mba”.

Berdasarkan penjelasan diatas hal yang melatar belakangi penerapan sistem pemungutan pajak hotel adalah *self assessment system* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 91 tahun 2010 tentang pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan dipertegas dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010.

Hal ini di jelaskan oleh Bapak Nanang sebagai berikut :

“Pajak retribusi daerah itu pakai Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 mba.. tapi, kita pakai acuan peraturan daerah Nomor 16 tahun 2010 mba... Sesuai yang sudah di jelaskan bahwa sistem pemungutan nya itu sendiri menggunakan *self assessment* melalui program e-tax yang diterapkan di Kota Malang. kita memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, membayar sendiri, jika kita menemukan wajib pajak hotel yang melakukan atau terbukti memanipulasi data maka kita kenakan sanksi dari kita 2% setiap bulan sampai paling lama 15 bulan sejak saat masa terutang pajak”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menggunakan program *e-tax* untuk mempermudah dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel, dengan menggunakan dasar peraturan daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang pajak hotel. Adapun kriteria wajib pajak hotel yaitu jumlah kamar lebih dari 10 harus melaporkan pajak hotel terutang. Jika dimana telah diketahui terjadi kebocoran akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan sampai paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak Hal ini ditegaskan oleh Bapak Nanang tentang sosialisasi yang di lakukan pemerintahan Kota Malang dalam memperkenalkan program *e-tax* berikut penjelasan nya:

“kami sudah melakukan sosialisasi beberapa event-event yang ada di kota Malang seperti acara yg diselenggarakan oleh kampus, acara seminar, dan iklan radio. Kami memperkenalkan tentang program e-taxnya.. supaya mempermudah wajib pajak dalam pengisian data dan pembayaran pajak daerah, disana kami jelaskan bagaimana cara menggunakan program e-tax nya kita ajari..”

Penjelasan hasil wawancara diatas menjelaskan tentang petugas dari Badan Pelayanan Kota Malang telah melakukan sosialisasi di beberapa tempat contohnya mendatangi *event-event* kampus , mendatangi seminar, dan menyiarkan iklan di radio. Petugas Badan Pelayanan memperkenalkan dengan cara memberi penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan program *e-tax* untuk membayarkan pajak daerah dengan lebih efisien. Tetapi pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tetap mengawasi wajib pajak hotel dalam pengawasan jika terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan dalam memasukan data tagihan pajak hotel sesuai dengan tarif pajak hotel.

b. Tarif Penetapan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel yang berasal dari jumlah pembayaran pajak atau yang seharusnya dibayarkan kepada pengelola hotel (Siahaan, 2010:304). Pembayaran pajak hotel berupa hasil uang dari pembayaran harga jual yang ditetapkan oleh wajib pajak. Berikut penjelasan dari Bapak Nanang tentang tarif pajak hotel:

“tarif pajak hotel yah mba? Hmm.. 10% tapi kalo pajak kategori rumah kos 5% itu sesuai dengan peraturan daerah kota Malang, kalo rumah kategori rumah kos bisa dikenakan pajak hotel itu... rumah kos memiliki lebih dari 10 pintu kamar bisa dikenakan pajak hotel 5% itu mba... kota Malang itu , kota yang pertama kali gunain *e-tax*, jadi pemerintahan kota Malang memanfaatkan program *e-tax* agar lebih mudah untuk membayara pajak. karena sesuai dengan aturan *e-tax* agar tidak

terjadi sebuah kebocoran dalam pembayaran. Prosedur yang dilakukan kita sudah baik awal mula Bank Jatim sebagai Keusda (kredit usaha daerah) dari perbendaharaan dan itu harus ballance loh...”.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang peraturan daerah di Kota Malang tarif pajak hotel yang dikenakan sebesar 10% dan kategori rumah kos sebesar 5%. Wajib pajak hotel yang sesuai kriteria dengan memiliki sebuah rumah sewa atau rumah kos lebih dari 10 kamar akan dikenakan pajak hotel. Pemerintahan Kota Malang berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang dengan cara melakukan program *e-tax* untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya adalah pajak hotel. Pengertian *e-tax* sendiri adalah sebuah program yang dijalankan oleh pemerintahan daerah untuk mempermudah dalam rangka pembayaran pajak daerah dengan beberapa sistem berupa software.

Pajak hotel adalah pajak daerah yang memiliki target dan realisasi penerimaan yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena lokasi di Kota Malang sebagai sarana akses untuk transit ketempat-tempat wisata. Pemerintahan kota Malang memperkenalkan salah satu program yang bisa membantu dalam sebuah pencapaian pemerintahan daerah Kota Malang. Menurut staf di Badan Pelayanan Pajak Daerah sudah berusaha dengan baik berawal dari Bank Jatim sebagai Keusda (kredit usaha daerah) ke

perbendaharaan yang dilakukan harus sesuai dengan laporan yang ada. Oleh karena itu, dengan diterapkannya program *e-tax* yang memanfaatkan sarana program tersebut untuk membayar pajak dengan lebih mudah. Berikut ini penyajian data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang dari tahun 2001 – 2016:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang Tahun Anggaran 2014 – 2016

Tahun	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)
2014	347,817,577,770.96	372,545,396,292.03
2015	353,427,746,711.29	251,316,540,956.76
2016	382,418,229,000.34	477,338,468,000.43

Sumber: Laporan Realisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2014 – 2016.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini, menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu dikelola dengan baik dalam memberikan strategi untuk dapat meningkatkan target dan realisasi.

Berikut adalah target dan realisasi pajak hotel dari tahun 2014-2016:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang Tahun Anggaran 2014 – 2016

Tahun	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)
2014	17,169,937,368.68	25,069,025,889.87
2015	22,131,094,351.27	31,828,508,228.43
2016	27,680,570,300.00	37,857,637,844.26

Laporan Realisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2014 – 2016

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 – 2016 target penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dan realisasi penerimaan pajak hotel juga mengalami peningkatan. Ardiansyah (2015:113) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Prosedur pemungutan pajak hotel di Kota Malang diawali dengan wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset hasil pendapatan hotel itu sendiri. Dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset sendiri maka wajib pajak tersebut telah menghitung dan memperhitungkan pajak hotel yang akan dibayarkan. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah berisi tentang jumlah penerimaan

pendapatan pajak hotel setiap bulan, sedangkan rekap omset berisi tentang jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel setiap harinya dan jumlah penerimaan pendapatan tersebut akan diakumulasikan pada setiap akhir bulan. Sehingga jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset harus seimbang. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam penetapan tarif pajak hotel, karena tarif pajak hotel ditetapkan berdasarkan jumlah penerimaan pendapatan hotel dikali 10% dan kategori rumah kos dikali 5%. Penetapan tarif pajak hotel sebesar 10% dan kategori rumah kos 5% yang diperoleh dari penerimaan pendapatan hotel sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak hotel.

c. Dokumen yang Digunakan Pajak Hotel

Pengisian informasi mengenai penerimaan pendapatan hotel pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset sesuai dengan penerimaan pendapatan pajak hotel yang sebenarnya. Hal ini juga di benarkan menurut Ibu Dewi selaku wajib pajak hotel dalam kategori rumah kos yang dikenakan pajak hotel mengatakan sebagai berikut:

“waktu itu tahun 2013, petugas datang kesini untuk mendata dan ngasih tau. kalo saya kena pajak hotel. lalu setelah itu saya ke bppd yang ada di kedungkandang saya disuruh bawa KTP terus dikasih formulir pendaftaran yaitu SPTPD, setelah itu baru

diberikan NPWPnya dan dibuatkan kartu NPWPD, kalau dulu kita bayar harus bawa SPTPD tapi sekarang udah bisa lewat M-banking kayak aplikasi pajak online itu namanya kalo gasalah e-tax nanti dikasih kode akses dari pihak sananya”

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas mengenai penerapan sistem pemungutan pajak hotel oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang seperti hal nya yang sama dijelaskan oleh pihak BPPD bahwa penerapan sistem pemungutan pajak hotel menganut sistem *self assessment system* calon wajib pajak yang dikenakan pajak hotel. Selanjutnya, calon wajib pajak hotel mendaftarkan diri dengan mengisi SPTPD yang diberikan oleh pihak BPPD. Kemudian, akan diberikan NPWP oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Hotel setelah mengisikan dan memberikan dokumen persyaratan dalam pendaftaran wajib pajak hotel. Selain itu pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah memberikan kemudahan dalam membayarkan pajak hotel dengan menggunakan e-Payment.

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh wawancara dengan pemilik rumah sewa kos yang bernama Ibu Endang yang menjelaskan tentang penerapan sistem pemungutan pajak hotel berikut penjelasannya:

“saya sudah terdaftar pajak hotel itu sejak tahun 2016 prosedur pemungutan pajak hotel di kota Malang semakin baik, pertama tama kita diberikan sosialisasi oleh petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah setelah itu kita melakukan sendiri pendaftaran wajib pajak supaya dikasih NPWP terlebih dahulu ke kantor terpadu dan membawa KTP. Tetapi, sebelum itu kita

mengisikan formulir yang telah diberikan. Setelah itu kita diberikan kode akses untuk melogin ke aplikasi pajak online yang dibuat oleh BPPD”

Berdasarkan penjelasan dengan hasil wawancara yang di jelaskan oleh Ibu Dewi dan Ibu Endang mengatakan penerapan sistem pemungutan yang terjadi di Kota Malang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh pemerintahan Kota Malang yang menggunakan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, dengan prosedur yang sesuai dapat memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kendala yang Dihadapi Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel

a. Jumlah personil atau pegawai yang mencatat wajib pajak hotel

Disetiap Pemerintahan Daerah yang menuju perubahan dengan baik akan memiliki sebuah kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pemungutan pajak daerah salah satunya pajak hotel. Hal ini, yang dialami oleh Pemerintahan Kota Malang, berikut penjelasan dari Ibu Beta:

“Begini yah mba... kita sudah mencoba mendekatkan diri dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat khususnya wajib pajak hotel dan rumah kos, maka memungkinkan BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) di Malang itu nantinya dapat lebih maksimal itu harapan kita... diantaranya kemudahan dalam menjangkau para wajib pajak , mendata objek pajak baru serta memperpendek jarak kendali pelayanan pajak daerah. Tetapi kurangnya pegawai yang ada menjadi kendala dalam

pemungutan pajak daerah apalagi kan mba.. rumah kos di kota malang daerah kerto , sigura-gura, suhat banyak kurangnya pegawai kita terkadang jadi hambatan nya disitu mba...”.

Berdasarkan penjelasan Ibu Beta diatas menjelaskan tentang usaha yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam bersosialisasi dengan masyarakat khususnya wajib pajak hotel dan rumah kos, kurangnya pegawai dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah, sehingga terjadi penghambatan dalam proses pendataan wajib pajak hotel baru. Contohnya wajib pajak hotel di sebagian daerah Kota Malang yang rumah kosnya lebih 10 kamar, tetapi masih belum terdaftar dalam pajak hotel. selain itu, faktor yang mendukung kendala dalam pemungutan pajak hotel adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam yang tidak mengerti bagaimana cara mendaftarkan sebagai wajib pajak hotel. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Nanang:

“iya mba... kendalanya kekurangan pegawai kita untuk bertugas mengawasi dan mencatat wajib pajak yang belum terdaftar, kan banyak banget mba.. makanya itu sampai saat ini kendala yang kita alami seperti itu selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penghasilan mereka padahal mereka sudah masuk dalam kriteria padahal kita sudah melakukan sosialisasi ke event-event contohnya kayak di kampus-kampus yang ada di kota Malang, pameran baju, memasang iklan seperti di koran lokal dan di radio, dan juga sosialisasi kita adakan beberapa kecamatan dan kelurahan di kota Malang.”

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Beta menjelaskan tentang yang sudah dibahas oleh Bapak Nanang bahwa kurangnya petugas dari pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah untuk

mengawasi dan mencatat masyarakat yang memiliki rumah sewa atau penginapan sebanyak 10 kamar. Hal ini di tunjukan dengan upaya yang dilakukan dengan cara sosialisasi oleh petugas dari pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan cara melakukan sosialisasi ke event-event yang ada di Kota Malang contohnya antara lain mendatangi event kampus, sebuah event festival clothing, sosialisasi terhadap beberapa kantor kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Malang.

b. Tingkat kesadaran wajib pajak hotel dalam mentaati pajak hotel

Kendala yang dihadapi pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang selain dari kurangnya pegawai yang bertugas, hal lain yang menjadikan pemicu sebagai kendala yang dihadapi adalah tingkat kesadaran wajib pajak. Berikut penjelasan yang dari Bapak Nanang:

“Mungkin yah mba... penyebabnya itu masyarakat masih kurang faham dengan bagaimana cara membayarkan pajak hotel dan kategori rumah kos. Itu jadi penyebabnya kita sudah beri sosialisasi mungkin faktor orang awam jadi belum mengerti prosedurnya...”

Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajak terutang, itu menjadi sebuah penyebab atas hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Malang. Dengan terjadi kendala dengan kurangnya tingkat pegawai pajak dan kurangnya tingkat kesadaran pajak yang tidak paham akan

prosedur penerapan sistem pemungutan pajak hotel akan menjadi masalah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, dapat memicu wajib pajak melakukan kesalahan dalam pengisian data pajak terutang. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang sangatlah penting hal ini ditegaskan oleh Ibu Dewi selaku pemilik rumah sewa kos. Berikut penjelasan yang diberikan oleh wajib pajak hotel:

“awalnya saya gatau kalo saya kena pajak hotel saya orang awam mba.. trus karna ada sosialisasi dari kelurahan sini akhirnya ada beberapa tetangga saya yang kena pajak hotel yang memiliki kos-kosn dan ada beberapa mereka yang gatau cara bayar pajak. Padahal kita dari dulu sudah punya rumah kos dimzana-dimana, tapi baru-baru ini ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah). Menurut saya pihak BPPD sudah melakukan sosialisasi yang baik dengan penjelasannya. Tapi, disini lain banyak yang sudah orangtua tidak mengerti cara bayar pajak dengan online, kan juga pemicu masalahnya juga dari situ juga mba...”

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Dewi mengatakan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak yang tidak mengerti tata cara pembayaran pajak hotel yang terutang, dengan sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Penyebab kurang kesadaran wajib pajak hotel dengan pemahaman yang diberikan dipicu dengan tingkat pemahaman yang kurang dengan diterapkannya pembayaran online menggunakan aplikasi pajak online oleh pemerintahan Kota Malang. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pemilik rumah sewa kos tentang penerapan pajak hotel:

“menurut pendapat saya sih, sudah baik tapi ya.. kadang ada kurangnya... kemarin malah ada permasalahan salah input data karena kan sekarang sistemnya pake aplikasi jadi agak susah dipahamin aja gitu. Jadi kita salah faham jadi agak bingung cara membayarkan pajak hotel, kalo pajak rumah kos sendiri kita kena 5% dari hasil omset penghasilan per kamar. Dan juga kemarin saya baru dikenakan pajak mba.. untuk pembayaran sendiri saya juga membayar pajak 6 bulan sekaligus karena kan sistem kos-kosn yang ada di kita kan per semester.”

Dapat dijelaskan bahwa adanya kesalahpahaman oleh wajib pajak yang tidak bisa mengisi data dan juga dalam menginput jumlah omset yang dikenakan kepada wajib pajak hotel. Kurangnya penegasan permasalahan ini oleh pegawai Badan Pajak Daerah yang tidak menyeluruh dalam bersosialisasi tentang bagaimana arahan dalam penerapan pemungutan pajak hotel di Kota Malang. Informan juga menjelaskan bahwa penerapan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos bisa melakukan sistem pembayaran sekaligus yang dibayarkan dalam 6 bulan sekali dikarenakan uang sewa yang diperoleh di setiap persemester.

3. Strategi yang Dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

a. Strategi sistem dalam penerapan pemungutan pajak hotel

Sejak dituangkan nya eksentifikasi pajak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah di Kota Malang dengan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kos. Hal ini menjadikan Badan Pelayanan Pajak Daerah sebagai

badan yang memiliki wewenang dalam pemungut pajak daerah. Oleh karena itu, Kota Malang memiliki beberapa strategi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dijelaskan oleh Ibu Beta sebagai berikut:

“seperti yang sudah saya jelaskan tadi diawal mba.. BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) telah melakukan upaya ke beberapa tempat untuk melakukan sosialisasi yaitu tadi ke event-event, terus kami juga sosialisasi ke beberapa kecamatan dan kelurahan, dan itu juga kami telah menyiarkan bekerja sama dengan media massa tentang pentingnya membayar pajak ke masyarakat melalui media masa. Nah itu mba sosialisasinya.. sosialisasi sih penting banget.. agar WP (Wajib Pajak) bisa mentaati sih, tepat waktu dalam pembayaran pajaknya...”

Penjelasan yang diberikan oleh Ibu Beta menjelaskan tentang Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah berusaha melakukan sosialisasi dengan dilakukannya sosialisasi mendatangi event-event dan juga telah bekerjasama dengan media masa. Oleh karena itu, yang melatarbelakangi adalah kesadaran wajib pajak sehingga tingginya kesadaran wajib pajak membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus meningkatkan.

b. Strategi pembentukan dalam Pendapatan Asli Daerah

Badan Pelayanan Pajak Daerah telah berusaha dengan meningkatkan penerapan pemungutan pajak hotel yang lebih baik sehingga akan membawa dampak yang lebih baik lagi dengan strategi yang telah dilakukan. Hal ini juga dilengkapi dengan strategi-strategi yang dimiliki oleh kota Malang, dengan

melakukan pembentukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah berikut pemaparan yang di berikan oleh Bapak Nanang:

“ kiat-kiat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yah mba? Kalo kiat-kiat (strategi) yang kita terapkan di Kota Malang sesuai keputusan bersama oleh Ketua BPPD kota Malang bapak Ade dengan Walikota bapak Anton kesepakatan bahwa yang kita lakukan... pertama-pertama itu yah mba... kita membuat program pertama kali di Indonesia tahun 2015 itu menggunakan program e-tax, lalu dibentuknya satgas pemerintahan daerah, ketiga pembentukan tim UPL (Unit Pelaksanaan Lapangan) Perpajakan Daerah, keempat Pembentukan tim UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) di lima kecamatan, kelima menjaring pajak kost di kota Malang’.

Hal diatas dijelaskan bahwa strategi yang dilakukan kota Malang pertama yang dilakukan adalah membuat sebuah program yaitu e-tax, kedua pembentukan satgas untuk membantu dalam peningkatan pajak daerah, ketiga pembentukan ketiga pembentukan tim UPL (Unit Pelaksanaan Lapangan) Perpajakan Daerah, keempat Pembentukan tim UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) di lima kecamatan yang ada di kota malang, kelima menjaring pajak kost yang belum terdaftar dan telat membayar pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

a. Analisis sistem dan prosedur

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki peraturan yang mengatur tentang pajak hotel, dalam melakukan pungutan pajak hotel yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 91 tahun 2010 tentang pajak daerah yang dipungut, berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan dipertegas dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan penerapan sistem *self assessment*. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak daerah di Kota Malang dimana wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel yaitu menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk yaitu Badan Pelayanan pajak daerah Kota Malang sesuai dengan peraturan daerah. Dalam sistem pemungutan pajak hotel terdapat beberapa prosedur yang saling berkaitan satu dan yang lain yaitu prosedur pemungutan, prosedur verifikasi,

prosedur penetapan, dan prosedur pencatatan penerimaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Siahaan, 2010:310-311) menyatakan bahwa Dalam proses kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan dalam penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Prosedur dalam penerapan pemungutan pajak hotel di Kota Malang diawali dengan wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset hasil pendapatan hotel itu sendiri. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk untuk salah satu persyaratan pendaftaran, setelah itu calon wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset sendiri maka wajib pajak tersebut telah menghitung dan memperhitungkan pajak hotel yang akan dibayarkan. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah berisi tentang jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel setiap bulan, sedangkan rekap omset berisi tentang jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel setiap harinya dan jumlah penerimaan pendapatan tersebut akan diakumulasikan pada setiap akhir bulan. Sehingga jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset harus

seimbang. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam penetapan tarif pajak hotel.

Kota Malang mulai menerapkan pajak online pada tahun 2014 tentang aturan dalam pembayaran pajak daerah secara online yang bernama *e-tax*. Kegunaan dalam memakai sistem aplikasi pajak online ini tentu mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak daerah salah satunya pajak hotel. Hal ini sesuai dengan H.Kerzener yang dikutip oleh Arfan Ikhsan dan Prianthara (2009:12) menjelaskan sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human) yang diorganisir diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Pajak online yang diterapkan oleh pemerintah kota Malang sudah sangat baik dan terealisasi dengan baik dan keuntungan yang didapatkan sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajak hotel namun, menurut informasi telah ditemukan wajib pajak yang menyalahgunakan pengisian data melalui pajak online dengan memanipulasi data.

Selain dari penerapan pemungutan pajak online, petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

melakukan demo tentang pentingnya membayar pajak dengan cara menyiarkan berita di koran, radio, dan televisi lokal yang ada di kota Malang tidak lupa juga petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mendatangi sebuah acara event-event yang ada di kampus, dan seminar nasional. Hal ini juga di benarkan oleh Mulyadi (2010:5) yaitu suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi, Sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan dimana sistem terdiri dari jaringan prosedur yang sudah dibuat dan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara berulang-ulang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu menjadi lebih baik.

b. Tarif penetapan pajak hotel

Pentapan Tarif yang ada di kota Malang sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Tarif pajak hotel yang dikenakan sebesar 10% dan kategori rumah kos sendiri sebesar 5%, adapun sanksi administrasi yang diberikan untuk wajib pajak hotel apabila melakukan tindak penyalagunaan sebesar 2% setiap bulan sampai paling lama 15 bulan sejak saat masa terutang pajak. Hal ini,

sesuai dengan peraturan daerah yang ada di Kota Malang Nomer 16 Tahun 2010 tentang pajak hotel. Pembayaran yang dilakukan wajib pajak hotel dikenakan sesuai dengan harga jual yang ada di hotel tersebut. Pengenaan tarif pajak hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar yang telah disewakan oleh wajib pajak. Jika, terbukti terjadi penyalahgunaan dengan memanipulasi data, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Malang dikenakan sanksi 2%.

c. Dokumen yang digunakan pajak hotel

Dokumen yang digunakan pajak hotel yaitu menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disetiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD. Selanjutnya, SPTPD harus diisi dengan jelas dan benar, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, Menurut Mulyadi (2010:3) formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan dokumen, karena formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi di dokumentasikan di atas secarik kertas. Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah atau disebut juga SPTPD digunakan untuk menghitung, menetapkan dan membayar Pajak Hotel. Di kota Malang sendiri juga menggunakan dokumen SPTPD sebagai pengisian data yang dibutuhkan dalam membayarkan pajak. Namun sekarang di kota Malang menggunakan *e-tax* yang menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan pajak terutang seperti yang dijelaskan pada peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah, merupakan regulasi Pemerintah Kota.

2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

a. Tingkat kesadaran wajib pajak hotel dalam mentaati pajak hotel

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan ayat 1 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan

atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gouest house, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Hal ini tidak sesuai dengan masih banyak masyarakat yang memiliki usaha atas hotel atau rumah sewa yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak hotel. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajak terutang, itu menjadi sebuah penyebab atas hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Malang. Oleh karena itu, sangat berpeluang pemicu kesalahan wajib pajak dalam menyetorkan pajak terutang yang mengakibatkan kesalahan memasukan data.

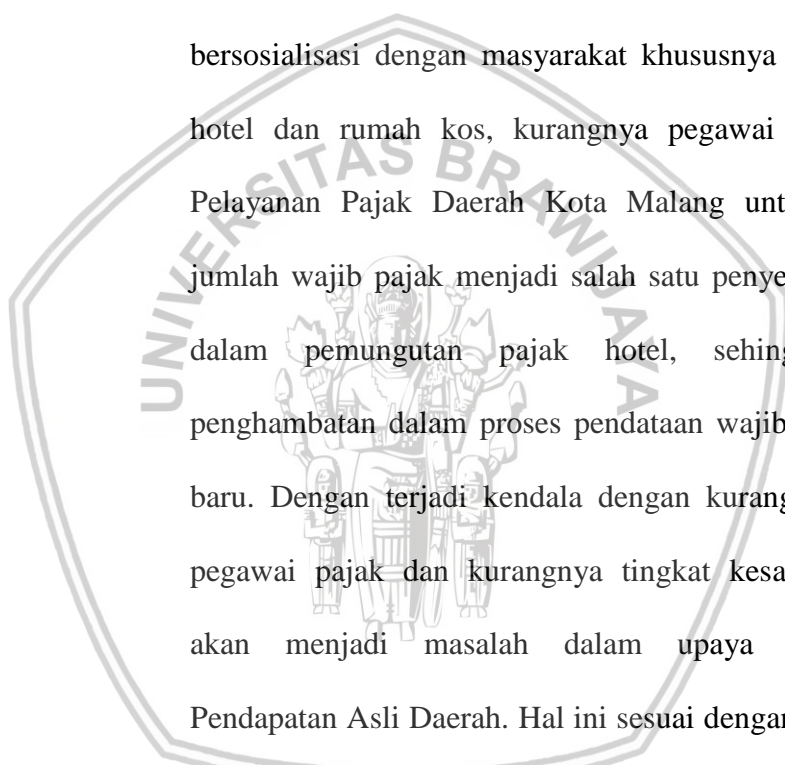
Dengan adanya kesalah pahaman dapat mengakibatkan kendala dalam strategi yang dilakukan pemerintahan Kota Malang demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal. Kendala dalam tingkat kesadaran wajib pajak yang menjadi permasalahan disetiap pemerintahan, tentu menjadi tugas terpenting sebuah pemerintahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang tersalur dalam pajak hotel sebagai sumber penerimaan daerah. Namun, dengan kendala kurangnya kesadaran wajib pajak hotel di kota Malang tidak sesuai dengan Kurniawan (2004:126) yang menyatakan bahwa sistem pemungutan

pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Pajak Daerah Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak yaitu *Self Assessment System* dimana pemungutan pajak yang di berikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa informan 2 menyatakan pembayaran pajak hotel dapat dibayarkan secara sekaligus 6 bulan dikarenakan omset yang diperoleh baru diterima persemester, atau dengan kata lain mendapatkan penghasilan per-6 bulan bahwa pembayaran kos dibayarkan pada saat menerima pendapatan. Namun, menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan bahwa pembayaran diberlakukan selama satu kalender yang artinya, pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak selama satu bulan.

b. Jumlah personil atau pegawai dalam mencatat wajib pajak hotel

Selain dari tingkat kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, kepemilikan pegawai yang rendah adalah sebuah kendala dari tanggungjawab petugas yang diberikan oleh petugas dari Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Hal ini menjadikan kendala dari Badan Pelayanan Pajak Daerah di kota Malang dalam bersosialisasi dengan masyarakat khususnya wajib pajak hotel dan rumah kos, kurangnya pegawai dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk mendata jumlah wajib pajak menjadi salah satu penyebab kendala dalam pemungutan pajak hotel, sehingga terjadi penghambatan dalam proses pendataan wajib pajak hotel baru. Dengan terjadi kendala dengan kurangnya tingkat pegawai pajak dan kurangnya tingkat kesadaran pajak akan menjadi masalah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ardiansyah (2015) adalah sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebuah pemerintahan daerah yang harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kemudian pemerintah daerah mengarahkan untuk mempercepat



terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang adalah kekurangan pegawai untuk melakukan sosialisasi dalam pendataan wajib pajak hotel, dan juga kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak yang membayarkan pajak atas ketidaktahuan dalam tata cara pemungutan pajak hotel yang ada di kota Malang. Selain itu peneliti menemukan sebuah kesenjangan (gap) yang dilakukan oleh wajibpajak dalam melakukan pembayaran yang dilakukan, dikarenakan wajib pajak membayarkan pajak terutang sekaligus per-6 bulan karena omset penerimaan baru didapat pada saat per-6 bulan dengan demikian wajib pajak hotel membayarkan sekaligus. Namun, wajib pajak sendiri tidak ingin dikenakan dalam sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintahan kota Malang. Seharusnya pemerintah melakukan penambahan staf pegawai tambahan untuk membantu

proses pendataan wajib pajak, kemudian peneliti menyarankan pemerintah agar mengantisipasi dalam keterlambatan ataupun penghindaran pajak yang akan terjadi, maka Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang tetap menerima pembayaran pajak secara borongan atau sekaligus untuk pembayaran beberapa bulan kedepan. Hal ini menjadikan tindakan yang tidak sesuai dan melanggar dari peraturan daerah yang ditentukan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah.

3. Strategi yang Dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

a. Strategi sistem dalam penerapan pemungutan pajak hotel

Peraturan Daerah di Kota Malang dengan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kos. Hal ini menjadikan Badan Pelayanan Pajak Daerah sebagai badan yang memiliki wewenang dalam pemungut pajak daerah. Oleh karena itu, Kota Malang memiliki beberapa strategi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil wawancara oleh informan pertama yaitu Ibu Beta bahwa strategi yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota

Malang telah berusaha melakukan sosialisasi dengan dilakukan nya sosialisasi mendatangi event-event dan juga telah bekerjasama dengan media masa. Strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah sudah sangat bagus dengan mendatangi di beberapa kelurahan, namun lebih ditingkatkan kembali dan diawasi untuk hasil yang maximal. Oleh karena itu, yang melatarbelakangi adalah kesadaran wajib pajak sehingga tingginya kesadaran wajib pajak membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus meningkatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wicaksono (2008:17) hal yang perlu mendapat perhatian dalam strategi peningkatan pajak daerah ada beberapa faktor, antara lain: faktor perundang-undangannya, faktor aparatur pajak, faktor wajib pajak dan faktor sosial ekonomi.

b. Strategi pembentukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

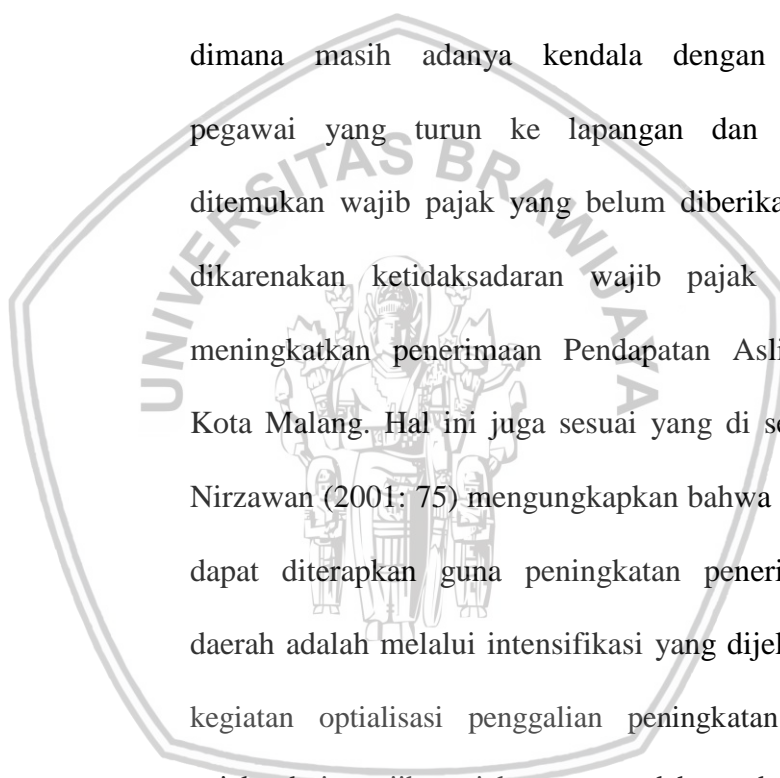
Menurut penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Nanang bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan pemerintahan kota Malang melakukan kesepakatan dengan membuat beberapa strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Strategi yang dibuat adalah membuat sebuah program yaitu e-tax, kedua pembentukan

satgas untuk membantu dalam peningkatan pajak daerah, ketiga pembentukan tim UPL (Unit Pelaksanaan Lapangan) Perpajakan Daerah, keempat Pembentukan tim UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) di lima kecamatan yang ada di kota malang, kelima menjaring pajak kost yang belum terdaftar dan telat membayar pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam penyajian data, peningkatan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang mengalami peningkatan dalam prosentase. Prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi yang menjadikan tidak seimbang, dapat dikarenakan pembatasan jumlah jumlah wajib pajak hotel yang dikarenakan Kota Malang tidak memiliki lahan kosong untuk membangun sebuah hotel. Oleh karena itu, diharapkan jika target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang mengalami peningkatan maka harus diimbangi dengan adanya peningkatan pada prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang karena dengan adanya keseimbangan tersebut dapat menunjukkan bahwa

Kota Malang sudah mampu mengelola sumber sumber penerimaan pendapatan daerah dengan maksimal.

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan pajak Daerah untuk kesejahteraan sudah cukup terealisasi dengan baik, namun disisilain peneliti telah menemukan beberapa ketidaksesuaian yang dimana masih adanya kendala dengan kekurangan pegawai yang turun ke lapangan dan juga masih ditemukan wajib pajak yang belum diberikan sosialisasi dikarenakan ketidaksadaran wajib pajak hotel untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Hal ini juga sesuai yang di sebutkan oleh Nirzawan (2001: 75) mengungkapkan bahwa strategi yang dapat diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah adalah melalui intensifikasi yang dijelaskan dalam kegiatan optialisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar, sebagai pelaksana dalam kegiatan ini adalah Bidang Pendapatan Non PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan ekstensifikasi yang merupakan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka secara garis besar penelitian tentang “Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Penggunaan sistem ini lebih efektif dan efisien dalam melakukan pemungutan pajak hotel karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Penerapan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori dari sistem pemungutan *self assessment*.
2. Kurangnya pegawai dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menjadi penyebab kendala dalam pemungutan pajak, sehingga terjadi

penghambatan dalam proses pendataan wajib pajak hotel baru. Selain dari tingkat kepemilikan pegawai yang rendah ada sebuah kendala yaitu sosialisasi oleh petugas dari pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang memungkinkan wajib pajak mengalami kesalahpahaman dalam melakukan pengisian data. Serta, telah ditemukan senjangan dikarenakan sistem penerapan yang dilakukan wajib pajak yang membayar pajak dengan sekaligus per-6 bulan bukan disetiap bulan.

3. Strategi yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah berusaha melakukan sosialisasi dengan dilakukannya sosialisasi mendatangi event-event dan juga telah bekerjasama dengan media masa. Selain itu, dilakukannya pembuatan sebuah program yaitu e-tax, kedua pembentukan satgas untuk membantu dalam peningkatan pajak daerah, ketiga pembentukan ketiga pembentukan tim UPL (Unit Pelaksanaan Lapangan) Perpajakan Daerah, keempat Pembentukan tim UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) di lima kecamatan yang ada di kota malang, kelima menjaring pajak kost yang belum terdaftar dan telat membayar pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran alternatif untuk penerapan sistem pemungutan pajak hotel dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah antara lain:

1. Saran Bagi Pemerintah

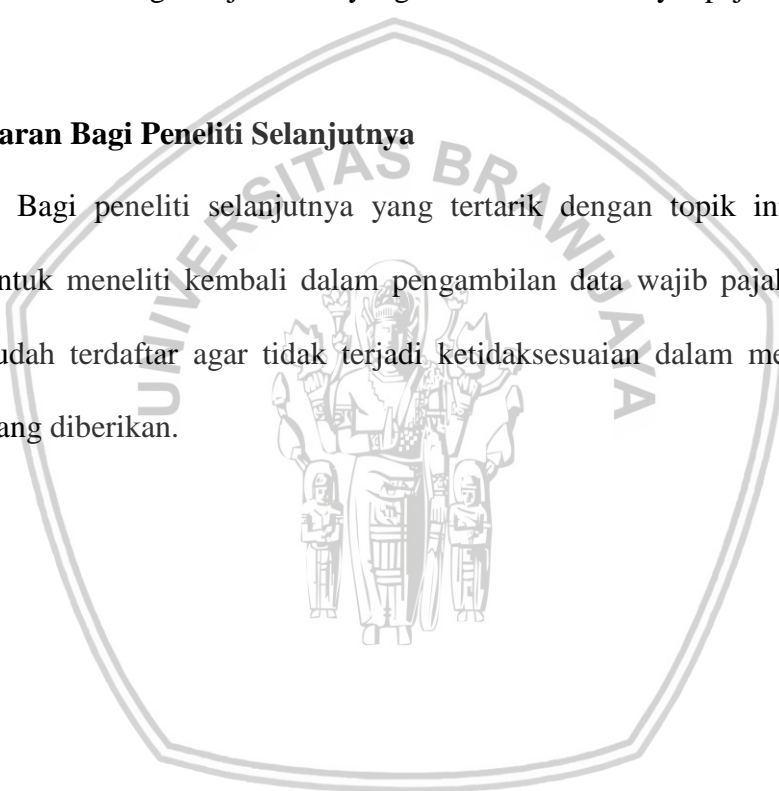
- a. Meningkatkan koordinasi antar bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel sehingga setiap bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel dapat memahami penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang sebenarnya agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang diberikan.
- b. Menambahkan jumlah Sumber Daya Manusia yaitu memiliki pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang agar kinerja pegawai untuk mendata jumlah wajib pajak yang ada di kota Malang semakin meningkat.
- c. Memaksimalkan potensi pajak hotel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang dan apabila dilihat dari prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai seimbang dengan prosentase target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diinginkan.
- d. Membentuk tim penyusunan dari pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam penerapan sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dengan penerapan

sistem pemungutan pajak agar dapat melakukan sosialisasi yang baik dan bisa dipahami oleh wajib pajak.

- e. Kesadaran wajib pajak lebih ditingkatkan kembali dan lebih peduli akan pembayaran pajak hotel yang ada di kota Malang, dengan harapan peningkatan yang dilakukan oleh penerimaan pendapatan dari pajak hotel Kota Malang menjadi kota yang tertib akan membayar pajak.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini disarankan untuk meneliti kembali dalam pengambilan data wajib pajak hotel yang sudah terdaftar agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam mengolah data yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*. Fak . Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Arfan Ikhsan. & I.B. Teddy, Prianthara. (2009). *Akuntansi Untuk Manajer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Eno Suhendi .2008. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005*”, Skripsi Fakultas Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.
- Fuad, Anis dan Kandung Spto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akad
- Habibi, Muhammad Mujtaba, (2015) *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota / Kabupaten*. Universitas Negeri Malang.

Husman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Source Book or New Methods*, Beverly Hills: Sage Publication

Mardiasmo. 2009. *perpajakan*. Yogyakarta : ANDI

Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nasucha, C. 2005. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siahaan, M.P. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, H. Rochmat, Prof, Dr, SH. 1988. *Asas Perpajakan 2*. Bandung: PT. Eresco Bandung.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Suhendi, Eno. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005*. Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.

Sukwiaty. 2004. *Ekonomi*. Bandung: Yudhistira.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Susanawati Ferry, Suparta I Wayan, Husaini Muhammad. 2014. *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Malang

Peraturan Kota Malang Nomor 20 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, diakses pada Tanggal 2 November.

Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Skripsi dan Jurnal

Prayoga, Ardo Dimas Bagus, 2016. *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Universitas Brawijaya.

Memah, Edward W, 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sholikah, Ani Maratus.2014. *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos*.Universitas Islam Negeri Malang

Wicaksono, Itok dan Haerah, Kahar. 2008. *Upaya Peningkatan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember)*. Jurnal Politico, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, ISSN:1829-6696, Volume VIII Nomor 1 Maret 2008

Internet

www.bppd.malangkota.go.id diakses pada tanggal 12 Oktober 2017

www.malangkota.go.id diakses pada tanggal 28 Maret 2018

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Informan 1:

Nama : Surya Betasari

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Tanggal : 21 Desember 2017

Waktu : 13.35

A : Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang?

B : penerapan yang telah kita lakukan sudah baik dan maximal

A : Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang telah sesuai dengan peraturan yang ada?

B : dah semuanya peraturan pajak daerah yang ada di Kota Malang telah menyesuaikan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010

A : Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel tertera dalam peraturan daerah Kota Malang?

B : Hmm sudah mba...

Lanjutan Lampiran 1

A: Bagaimana mekanisme pembayaran pajak hotel di Kota Malang?

B : sekarang sudah beda mba... dulu kan bayar lewat bank jatim sekarang bisa lewat m-banking semenjak ada e-tax.

A :Apakah dari sistem penerapan sistem pemungutan pajak hotel tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota malang?

B : ya tentu mba berpengaruh...

A : Berapa besar tarif pajak daerah di kota malang?

B : kalo pajak hotel sendiri 10% tapi kalo rumah sewa seperti rumah kos gitu 5% itu harus memiliki kriteria lebih dari 10 kamar baru dikenakan.

A : Bagaimana mekanisme pendataan, pendaftaran, penetapan dari pajak hotel tersebut?

B : Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan kayak membawa KTP, berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang kami berikan, kemudian diberikan kepada wajib pajak lagi mba setelah diketahui penetapan tarif... setelah itu baru kita memberikan kode akses untuk cara pembayaran pajak daerah ngegunain e-tax.

Lanjutan Lampiran 1

A : Apakah selama penerapan sistem pemungutan pajak hotel pernah ada terjadi penyalahgunaan data dalam memasukan data ?

B : ya ada mba... kita tindaak lanjuti nanti bisa dijelaskan oleh bapak nanang yaa....

A : Bagaimana sistem pelaporan pajak hotel di kota Malang?

B : Dulu... Wajib Pajak Hotel itu wajib melaporkan kepada pihak pemerintahan Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam praktik sehari-hari tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.

A : Apa saja kendala atau hambatan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang?

B : kita kekurangan pegawai dan juga ada beberapa wajib pajak yang kurang sadar buat bayar pajak mba

A : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut sehingga pendapatan Asli Daerah dapat meningkat?

B : dilakukan nya strategi yang kita terapkan pertama-pertama itu yah mba... kita membuat program pertama kali di Indonesia tahun 2015 itu menggunakan program e-tax, lalu dibentuknya satgas pemerintahan daerah, ketiga pembentukan tim UPL (Unit Pelaksanaan Lapangan) Perpajakan

Lanjutan Lampiran 1

Daerah, keempat Pembentukan tim UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) di lima kecamatan, kelima menjaring pajak kost di kota Malang.



Lanjutan Lampiran 1**Informan 2:**

Nama : Nanang Swestinura, S.Ab

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pendaftaran

Tanggal : 21 Desember 2017

Waktu : 14.15

A : Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang?

B : penerapan nya sudah baik mba..

A : Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang telah sesuai dengan peraturan yang ada?

B : kita selalu menerepkan dari Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 itu mba..

A : Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel tertera dalam peraturan daerah Kota Malang?

B :sudah...

A : Bagaimana mekanisme pembayaran pajak hotel di Kota Malang?

B : sekarang sudah beda mba... dulu kan bayar lewat bank jatim sekarang bisa lewat m-banking semenjak ada e-tax

Lanjutan Lampiran 1

A :Apakah dari sistem penerapan sistem pemungutan pajak hotel tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota malang?

B : ya tentu mba berpengaruh...

A : Berapa besar tarif pajak daerah di kota malang?

B : kalo pajak hotel 10% tapi kalo rumah sewa seperti rumah kos gitu 5% itu harus lebih dari 10 kamar.

A : Bagaimana mekanisme pendataan, pendaftaran, penetapan dari pajak hotel tersebut?

B : seperti yang sudah di jelaskan oleh ibu beta.. Kegiatan pendaftaran dan pendataan pertama-tama mempersiapkan dokumen yang diperlukan kayak membawa KTP, formulir pendaftaran dan pendataan yang kami berikan, kemudian kita berikan kode akses menggunakan e-tax.

A : Apakah selama penerapan sistem pemungutan pajak hotel pernah ada terjadi penyalahgunaan data dalam memasukan data ?

B : ya ada mba... kita vervikasi lapangan terlebih dahulu lalu kita urus dan kita beri surat teguran kemudian kita panggil dan kita periksa dengan bukti-bukti yang sudah lalu setelah ternukti kita berikan sanksi.

A : Bagaimana sistem pelaporan pajak hotel di kota Malang?

Lanjutan Lampiran 1

Lanjutan Lampiran 1

B : sekarang sudah pelaporan bisa langsung menggunakan e-tax tidak perlu melaporkan massa pajak nya ke kantor sekarang bisa online.

A : Apa saja kendala atau hambatan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang?

B : .ya itu mba.. kita kurang ada pegawai yang turun ke lapangan untuk mendata wajib pajak sama kadang ada beberapa wajib pajak yang kurang sadar buat bayar pajak. Apalagi kan yang kategori rumah kos itu masyarakat awam.

A: Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut sehingga pendapatan Asli Daerah dapat meningkat?

B : sama seperti yang dikatakan ibu beta yaitu dilakukan nya strategi yang kita terapkan pertama-pertama kita itu menggunakan program e-tax, lalu dibentuknya satgas pemerintahan daerah, ketiga pembentukan tim UPL (Unit Pelaksanaan Lapangan) Perpajakan Daerah, keempat Pembentukan tim UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) di lima kecamatan, kelima menjaring pajak kost di kota Malang.

Lanjutan Lampiran 1**Informan 3:**

Nama : Dewi Sukriyah

Alamat : Perumahan Bumi Kepuh Permai Blok B No.13

Tanggal : 27 Maret 2018

Waktu : 19.15

A: Apakah anda mengerti tentang adanya pajak hotel?

B : sudah mba...

A: Sejak kapan menjadi wajib pajak hotel?

B : Sejak tahun 2013

A : Tiap bulan anda di kenakan tarif berapa?

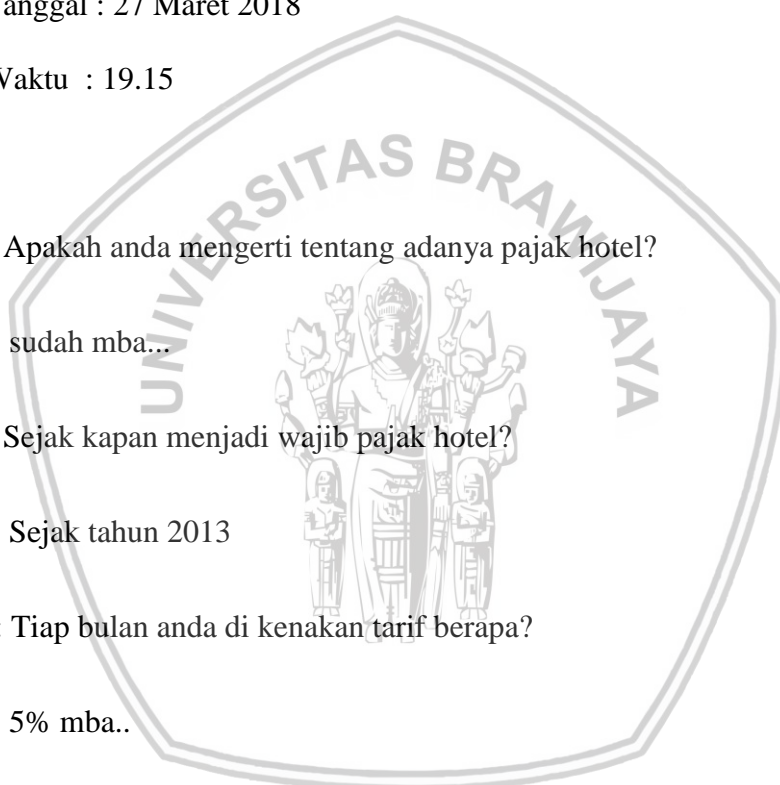
B : 5% mba..

A : Dimana anda membayarkan pajak?

B : di Kantor terpadu yang ada di kedungkandang itu loh mbaa namanya BPPD, tapi bisa sih pakai aplikasi pajak daerah namanya e-tax kalo gasalah... tapi saya lebih menyukai bayar langsung.

A : Apakah anda tahu tatacara pembayaran wajib pajak hotel?

B : ya saya tau..



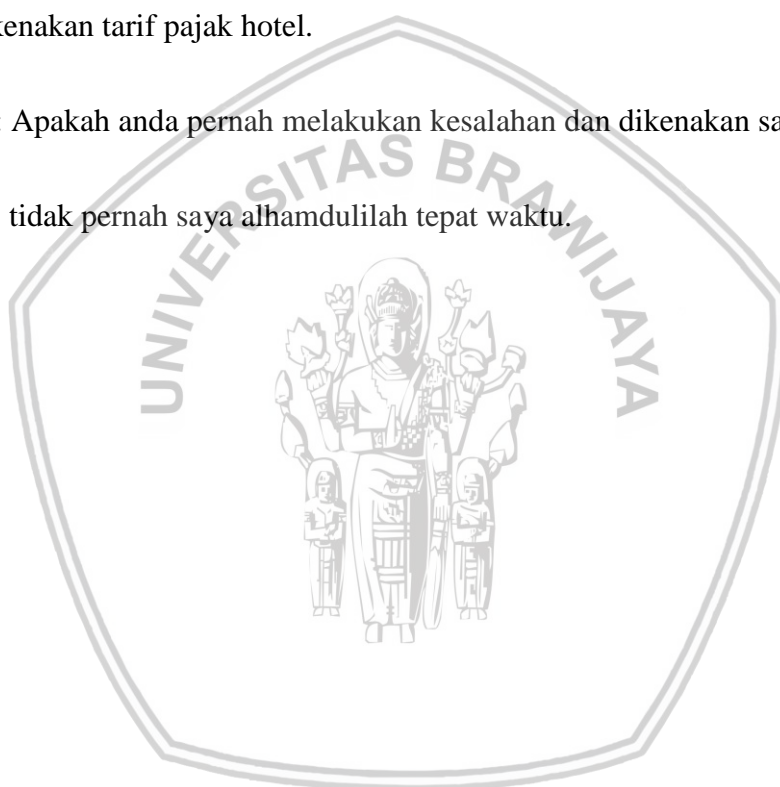
Lanjutan Lampiran 1

A : Bagaimana tatacara yang anda ketahui dalam melakukan pembayaran pajak hotel?

B : saya disuruh bawa KTP terus dikasih formulir pendaftaran, setelah itu baru diberikan NPWPnya dan dibuatkan kartu NPWPD, kalau sudah baru dikenakan tarif pajak hotel.

A : Apakah anda pernah melakukan kesalahan dan dikenakan sanksi?

B : tidak pernah saya alhamdulillah tepat waktu.



Lanjutan Lampiran 1**Informan 3:**

Nama : Endang Sri Ningrum

Alamat : Bendungan Soetami no 5 kelurahan Sumberari

Tanggal : 28 Maret 2018

Waktu : 16.06

A: Apakah anda mengerti tentang adanya pajak hotel?

B : Awalnya saya gatau mba... karena saya kan ga ngerti begituan, jadi setelah ada sosialisasi di kampung kami dari kelurahan terus saya di tegur dan diberikan pemberitahuan sebelumnya...

A : Sejak kapan menjadi wajib pajak hotel?

B : Hmmm... sejak tahun 2016 baru-baru ini saya mba hehe...

A : Tiap bulan anda di kenakan tarif berapa?

B : kalo gasalah sih mbaa.. 5% setau saya...

A : Dimana anda membayarkan pajak?

B : kalo awal saya daftar di Kantor Terpadu yang ada di Kedungkandang BPPD namanya.. tapi anak saya bilang sudah bisa menggunakan aplikasi ya kadang-kadang pakai aplikasi tapi lebih enak langsung bayar ke kantornya...

Lanjutan Lampiran 1

A : Apakah anda tahu tatacara pembayaran wajib pajak hotel?

B : kurang begitu faham mbaa..

A : Bagaimana tatacara yang anda ketahui dalam melakukan pembayaran pajak hotel?

B : awal mulanya sih kita dikasih sosialisasi oleh petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah setelah itu kita melakukan sendiri pendaftaran wajib pajak supaya dikasih NPWP terlebih dahulu ke kantor terpadu dan membawa KTP. Tetapi, sebelum itu kita mengisikan formulir yang telah diberikan. Setelah itu kita diberikan kode akses untuk melogin ke aplikasi pajak online yang dibuat oleh BPPD, kalo kita ingin bayar lewat aplikasi begitu mba yang saya tau loh ya...

A : Apakah anda pernah melakukan kesalahan dan dikenakan sanksi?

B : tidak pernah.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah	TEORI	PEDOMAN WAWANCARA
1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah di Kota Malang?	Otonomi Daerah	1. Apakah otonomi daerah dan sistem pemungutan pajak saling mempengaruhi?
	Pendapatan Asli Daerah	1. Apakah dari penerapan sistem pemungutan pajak hotel dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? 2. Apa saja kontribusi yang dilakukan dalam penerepan sistestem pemungutan pajak hotel di kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Malang dalam menerapkan sistem pemungutan pajak hotel dan cara menyelesaikannya ?	Pajak Daerah	1. Apakah sistem pemungutan pajak hotel termasuk pada pajak daerah? 2. Berapa tarif pajak hotel di kota Malang?
	Sistem Pemungutan Pajak	1. Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel di kota Malang? 2. Apakah menganut self assessment system , official assessment system, with houlding system? 3. Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel di kota Malang tertera dalam peraturan daerah kota Malang? 4. Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel di kota Malang sudah se

	Pajak Hotel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak hotel di kota Malang? 2. Bagaimana mekanisme penyetoran pajak hotel di kota Malang? 3. Bagaimana mekanisme pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak hotel? 4. Bagaimana sistem pelaporan pajak hotel di kota Malang?
3. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?	Kendala & upaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kendala atau hambatan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang?
	Teori Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemerintahan kota Malang sudah melakukan strategi untuk mencapai tujuan administrasi pemerintahan? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut sehingga pendapatan Asli Daerah dapat meningkat?

Lampiran 3 Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pajak
Hotel di Kota Malang Tahun 2014

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENIS PUNGUTAN	JUALAH ANGGARAN SETELAH PAK	REALISASI PENERIMAAN				KETERANGAN
			DESEMBER 2014 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.	S/D DESEMBER 2014 Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PAJAK DAERAH	260.000.000.000,00	35.595.183.270,11	244.481.611.090,76	260.076.794.369,37	107,72	
2.	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		67.826.733,64	622.592.925,35	690.419.658,90	-	
	JUMLAH	260.000.000.000,00	35.445.010.003,75	245.104.204.025,11	260.767.214.028,66	107,99	

Malang, 30 JANUARI 2015

PENANTIAN KOTA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



WALY ADE HERAWANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19681017 199203 1 006

Lanjutan Lampiran 3

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 S/D DESEMBER 2014

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2014 SETELAH PAJ		REALISASI PENERIMAAN DESEMBER 2014		S/D DESEMBER 2014		KURANG/LEBIH	% DIB
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	260.000.000.000,00	244.481.611.099,78	38.594.183.270,11	280.076.794.369,87	(20.076.794.369,87)			
4 1 1 01	Pejabat Hotel	17.309.897.889,88	21.971.338.806,87	9.915.288.215,80	25.387.437.831,87	(8.117.469.626,15)			
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	7.170.962.019,26	10.898.215.071,00	1.252.190.172,00	12.148.403.243,00	(4.877.441.329,74)			
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	2.764.795.249,20	4.062.503.109,60	1.816.227.985,00	5.878.731.071,60	(3.113.687.833,40)			
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	1.893.186.849,00	2.121.922.438,87	244.762.278,00	2.366.684.714,87	(473.687.885,87)			
4 1 1 01 07	Hotel Milet	4.431.799.765,91	3.199.607.483,50	435.302.332,00	3.634.999.787,50	(786.788.978,41)			
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Hotel/Rumah Kos	448.636.145,83	611.316.680,00	122.104.688,00	733.421.388,00	(284.785.182,17)			
4 1 1 01 13	Wisma Periwisata	460.559.839,48	480.476.589,80	44.710.782,00	525.187.365,90	(64.627.526,42)			
4 1 1 02	Pejabat Restoran	28.476.834.884,04	27.443.838.588,72	2.808.923.234,18	30.249.582.812,90	(1.871.618.293,88)			
4 1 1 02 01	Restoran	17.455.846.391,70	15.710.555.226,22	1.595.330.892,00	17.305.886.118,22	(1.680.889.373,48)			
4 1 1 02 02	Rumah Makan	9.793.632.719,40	10.009.054.754,70	1.155.534.439,18	11.164.589.173,88	(1.370.896.469,48)			
4 1 1 02 03	Cafe	1.226.955.478,94	1.728.019.603,80	152.057.923,00	1.879.077.525,80	(661.122.046,96)			
4 1 1 03	Pejabat Hiburan	4.542.865.932,85	4.897.088.880,93	827.484.782,48	5.694.821.033,41	(692.555.113,68)			
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2.444.047.833,35	2.492.110.500,00	248.441.000,00	2.740.551.500,00	(294.889.699,65)			
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Buana/dll	275.802.761,56	148.178.750,00	56.495.775,00	204.674.525,00	(148.178.750,00)			
4 1 1 03 05	Pameran	111.898.234,85	159.968.000,00	1.049.500,00	159.968.000,00	(48.138.748,15)			
4 1 1 03 07	Karaoke	883.744.340,60	970.703.748,22	146.803.164,64	1.117.506.912,86	(233.762.772,16)			
4 1 1 03 10	Permainan Bilyard	91.940.043,97	46.885.950,00	3.359.500,00	48.685.450,00	(43.334.888,97)			
4 1 1 03 12	Permainan Bowling	62.588.669,37	37.273.425,00	3.359.500,00	40.671.975,00	(21.887.694,37)			
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	391.841.100,40	410.185.944,70	32.797.022,00	442.982.866,70	(51.141.768,30)			
4 1 1 03 16	Pertandingan Pukul Raga	55.532.772,00	69.906.239,00	6.969.140,00	76.955.373,00	(21.422.601,00)			
4 1 1 03 18	Pertandingan Olah Raga	99.410.004,37	101.943.750,00	25.167.280,85	127.111.030,85	(27.782.038,48)			
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	145.801.339,69	69.842.100,00	5.973.300,00	75.815.400,00	(69.888.989,69)			
4 1 1 04	Pejabat Reklama	18.440.408.932,89	17.594.889.782,12	1.883.078.915,00	19.478.018.697,12	(3.747.884.724,04)			
4 1 1 04 01	Reklama Papan/Billboard/Militer/Videotron/Magraton	11.015.128.453,00	13.746.202.380,12	1.564.144.285,00	15.310.346.625,12	(4.395.317.172,12)			
4 1 1 04 02	Reklama Lain	4.461.236.809,59	3.604.360.654,00	287.989.650,00	3.892.350.314,00	(568.886.495,59)			
4 1 1 04 03	Reklama Melekat/Stiker/Poster	8.139.521,99	20.930.400,00	-	20.930.400,00	(12.790.878,01)			
4 1 1 04 04	Reklama Selebaran	18.978.218,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00	(14.778.218,00)			
4 1 1 04 05	Reklama Berjalan	136.955.940,00	159.246.328,00	945.000,00	160.191.328,00	(23.238.368,00)			
4 1 1 05	Pejabat Penerangan Jalan	37.802.101.961,43	36.163.388.288,93	8.778.728.288,93	39.941.899.888,37	(2.139.657.607,15)			
4 1 1 05 01	Pejabat Penerangan Jalan PLN	37.456.943.638,94	36.005.031.785,00	3.763.606.121,00	39.768.777.893,00	(2.371.834.354,06)			
4 1 1 05 02	Pejabat Penerangan Jalan Non PLN	105.157.922,98	157.147.504,93	16.034.161,94	173.181.665,27	(68.028.748,29)			

Lampiran 3

L
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 S/D DESEMBER 2014

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2014 SETELAH PAJ	S/D BULAN LAU Rp.	DESEMBER 2014 Rp.	S/D DESEMBER 2014 Rp.	KURANG/LEBIH	% S/D BULAN
1	2	3	5	6	7	8	9
1 1	HASIL PAJAK DAERAH	280.000.000.000,00	244.481.611.009,76	35.593.181.270,11	280.076.794.369,87	(30.076.794.369,87)	107,72
1 1 01	Pajak Hotel	17.000.000.000,00	21.873.130.000,97	3.915.288.213,00	25.287.427.551,87	(3.117.400.000,97)	147,20
1 1 01 01	Hotel Bintang 4	7.170.902.019,26	10.086.210.071,00	1.252.150.172,00	12.148.403.243,00	(4.877.441.333,74)	169,41
1 1 01 01 01	Hotel Bintang 3	2.764.793.249,20	4.065.503.109,60	1.816.237.983,00	5.878.731.072,00	(8.113.697.833,40)	211,69
1 1 01 01 01 01	Hotel Bintang 2	1.093.186.849,00	2.121.922.436,87	244.762.270,00	2.366.684.714,87	(478.497.890,87)	120,01
1 1 01 01 01 01 01	Hotel Melayi	4.431.799.765,91	3.199.697.485,50	435.302.332,00	3.634.999.787,50	(796.796.978,41)	81,82
1 1 01 01 01 01 01 01	Lomari/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	448.636.145,18	611.316.650,00	122.804.688,00	733.421.348,00	(284.785.392,17)	164,49
1 1 01 01 01 01 01 01 01	Wisma Pariwisata	460.559.839,48	480.476.583,90	44.710.781,00	525.187.365,90	(64.827.808,43)	114,03
1 1 02	Pajak Restoran	28.476.814.584,04	27.448.630.389,72	2.003.923.354,18	30.946.952.012,99	(1.878.000.370,09)	108,93
1 1 02 01	Restoran	17.435.946.393,70	15.710.555.236,22	1.595.330.893,00	17.906.808.110,22	(16.090.379,48)	96,31
1 1 02 02	Rumah Makan	9.783.492.713,40	10.009.054.754,70	1.155.594.419,18	11.164.589.178,86	(1.370.896.409,48)	114,00
1 1 02 03	Cafe	1.238.935.478,94	1.726.030.692,80	152.087.023,00	1.878.077.525,80	(651.122.046,96)	218,67
1 1 03	Pajak Hiburan	4.846.585.522,30	4.907.686.860,68	827.884.732,49	5.094.921.083,42	(402.138.113,63)	120,04
1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2.444.047.883,39	2.492.110.500,00	248.441.000,00	2.740.551.500,00	(248.441.000,00)	112,13
1 1 03 02	Pengaliran Kasutan/Musik/Tari/Tur/Busana/di	275.862.781,99	148.178.750,00	56.495.775,00	204.674.525,00	(71.188.266,99)	74,19
1 1 03 03	Pameran	111.850.254,85	159.568.000,00	146.803.164,44	159.568.000,00	(48.130.745,10)	140,04
1 1 03 03 01	Kareoke	868.744.140,68	970.703.748,22	1.045.590,00	1.117.505.912,86	(238.762.774,18)	120,08
1 1 03 03 01 01	Pernikahan Bilyard	91.940.045,67	46.085.950,00	3.398.680,00	48.685.460,00	(48.294.869,67)	92,05
1 1 03 03 01 01 01	Pernikahan Bowling	62.359.609,37	37.273.425,00	32.787.022,00	40.671.975,00	(31.887.694,37)	88,21
1 1 03 03 01 01 01 01	Pernikahan Kertengasan	381.841.100,40	410.185.844,70	6.949.170,00	442.892.865,70	(81.141.768,30)	111,05
1 1 03 03 01 01 01 01 01	Panti Pijah/Refleksi	55.532.772,00	69.906.213,00	25.167.200,85	75.955.378,00	(31.402.681,00)	127,87
1 1 03 03 01 01 01 01 01 01	Pertandingan Olah Raga	99.410.004,37	101.943.750,00	5.973.300,00	127.111.000,85	(69.888.000,00)	92,00
1 1 03 03 01 01 01 01 01 01 01	Taman Rekreasi	145.801.339,09	69.842.100,00	5.973.300,00	75.815.400,00	(69.888.000,00)	92,00
1 1 04	Pajak Reklame	18.640.480.942,30	17.134.670.783,82	1.881.078.911,09	19.806.010.699,42	(8.247.894.724,04)	120,05
1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Milka/Videotron/Megatron	11.015.128.453,00	13.748.202.840,82	1.564.144.385,00	15.310.346.825,12	(4.268.217.172,87)	139,59
1 1 04 02	Reklame Kain	4.461.236.809,59	3.004.300.664,00	287.999.650,00	3.892.350.314,00	(988.000.498,59)	87,15
1 1 04 03	Reklame Melayat/Siliter/Poster	8.139.521,99	20.930.400,00	4.200.000,00	20.930.400,00	(12.796.878,01)	267,44
1 1 04 04	Reklame Selebaran	18.978.211,00	4.200.000,00	945.000,00	4.200.000,00	(14.778.211,00)	22,19
1 1 04 05	Reklame Berjalan	136.955.940,00	159.246.328,00	945.000,00	160.191.328,00	(23.245.389,00)	116,77
1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	37.802.102.901,83	36.182.280.280,83	1.776.770.289,34	39.941.059.569,27	(2.138.878.287,44)	106,22
1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	37.496.943.638,94	36.005.091.705,00	3.783.686.128,00	39.788.777.893,00	(2.277.834.254,06)	106,66
1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	105.157.922,98	157.147.504,93	16.034.161,34	173.181.666,27	(68.023.741,29)	164,49

Lanjutan Lampiran 3

		3	5	6	7	8	9
1 07	Pajak Parkir	1.847.897.738,99	2.500.406.190,00	240.440.819,09	2.780.048.109,09		
1 07 01	Pajak Parkir	1.847.897.738,99	2.500.406.190,00	240.440.819,09	2.780.048.109,09		
1 08	Pajak Air Tanah	701.130.420,40	798.315.800,54	66.320.114,00	819.387.584,44		
1 08 01	Pajak Air Tanah	701.130.420,40	798.315.800,54	66.320.114,00	819.387.584,44		
1 11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,75	82.766.786.682,74	19.827.176.873,30	102.593.963.555,04		
1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,75	82.766.786.682,74	19.827.176.873,30	102.593.963.555,04		
1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB)	59.860.267.840,29	53.408.280.180,52	2.472.216.177,00	53.880.496.357,52		
1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB)	59.860.267.840,29	53.408.280.180,52	2.472.216.177,00	53.880.496.357,52		
1 4	PENDAPATAN LAIR-LAIN YANG BAH	53.860.267.840,29	51.409.280.180,52	2.472.216.177,00	53.880.496.357,52		
1 4 07	PENDAPATAN DENDA PALAK	622.882.828,85	622.882.828,85	62.486.710,64	685.369.539,49		
1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	128.271.837,57	128.271.837,57	20.096.437,35	148.368.274,92		
1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	31.505.094,00	8.963.770,35	40.368.864,35	71.874.770,31		
1 4 07 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	62.151.724,91	9.841.058,40	569.122,96	72.561.906,27		
1 4 07 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.286.653,30	9.428.930,62	4.081,09	20.719.665,01		
1 4 07 05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	9.428.930,62	152.037,34	1.281.858,00	10.860.826,00		
1 4 07 06	Pendapatan Denda Pajak Parkir	7.120.355,92	4.566.561,49	265.921,60	11.952.843,01		
1 4 07 07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	4.566.561,49	265.921,60	265.921,60	5.098.404,69		
1 4 02 02	JASA GIBRO	789.809,48	789.809,48	27.408.700,47	27.408.700,47		
1 4 02 02 01	Jasa Giro Pemanggang Kas	789.809,48	789.809,48	27.408.700,47	27.408.700,47		
1 4 02 02 02	Jasa Giro Pemanggang Kas Atas Jambong	789.809,48	789.809,48	27.408.700,47	27.408.700,47		
1 4 09	Pendapatan Hasil Eksekusi atau Jaminan	25.628.448,79	25.628.448,79	25.628.448,79	25.628.448,79		
1 4 09 02	Hasil Eksekusi Jaminan atas pembongkaran relinda	25.628.448,79	25.628.448,79	25.628.448,79	25.628.448,79		
1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian lainnya	498.551.894,35	498.551.894,35	10.794.700,38	509.346.594,73		
1 4 10 07	Pendapatan dari Pengembalian lainnya	498.551.894,35	498.551.894,35	10.794.700,38	509.346.594,73		
1 4 20	Pendapatan dari Pengembalian lainnya	10.104.557,00	10.104.557,00	10.104.557,00	10.104.557,00		
1 4 20 07	Pendapatan dari Pengembalian lainnya	10.104.557,00	10.104.557,00	10.104.557,00	10.104.557,00		

Ilum Rekorulisi dengan BPKAD Kota Malang

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Dinas Pendapatan Daerah
NIP. 19681017 19203 1 006

Lampiran 4 Target Realisasi Pendapatn Asli Daerah dan Penerimaan Pajak
Hotel di Kota Malang Tahun 2015

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PAK	REALISASI PENERIMAAN				%	KETER
			DESEMBER 2015 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.	S/D DESEMBER 2015 Rp.			
1.	PAJAK DAERAH	272.000.000.000,00	28.959.973.672,30	287.854.994.071,46	316.814.967.743,76		116,48	
2.	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		357.679.390,32	2.885.717.929,41	3.243.397.319,73		-	
	JUMLAH	272.000.000.000,00	29.317.653.062,62	290.740.712.000,87	320.058.365.063,49		117,67	

JANUARI 2016

Malang,

KERALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



W. H. ADE HERAWANTO, MT

Pengetua Utama Muda
NIP. 19681017 199203 1 006

Lanjutan Lampiran 4

**TAHUN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 S/D DESEMBER 2015**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2015		REALISASI PENYERAPAN		KURANG/LEBIH
		SETELAH PAK	S/D BULAN LAJU	DESEMBER 2015	S/D DESEMBER 2015	
			Rp.	Rp.	Rp.	
4 1 1	MASJID PAJAK DAERAH	272.000.000.000,00	287.854.994.071,46	28.959.978.674,90	316.814.967.743,76	(44.814.967.743,76)
4 1 1 01	Pejabat Hotel	22.131.004.351,27	28.590.508.987,96	3.397.818.060,95	31.828.508.228,49	(9.697.693.877,16)
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	10.941.427.840,40	12.767.834.442,73	1.465.898.360,00	14.237.332.807,73	(3.295.898.962,33)
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	4.124.300.717,60	8.071.210.942,50	873.294.468,00	8.944.505.410,50	(4.820.204.693,00)
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	2.114.446.447,87	2.009.602.508,34	300.830.558,20	2.790.233.060,54	(675.786.612,67)
4 1 1 01 06	Hotel Melati	2.422.140.732,50	2.746.412.612,60	325.766.640,85	3.074.179.253,45	(652.038.520,85)
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	506.042.592,90	158.747.040,90	16.901.968,00	177.548.917,30	320.493.679,60
4 1 1 01 15	Guest House	1.024.921.020,00	790.522.079,01	75.609.916,00	866.131.945,01	158.789.074,99
4 1 1 01 16	Commer/Penghantaran/Pesangrahan/ Rumah Kos	1.000.000.000,00	1.584.059.788,00	154.537.040,50	1.738.576.832,50	(738.576.832,50)
4 1 1 02	Pejabat Restoran	28.476.594.584,04	34.249.738.016,17	4.231.405.148,03	39.071.320.184,22	(10.594.708.699,13)
4 1 1 02 01	Restoran	16.037.187.153,54	16.660.144.150,61	1.874.404.112,33	18.534.638.762,94	(2.497.451.607,40)
4 1 1 02 02	Rumah Makan	10.801.475.122,70	15.542.047.868,49	2.108.284.403,72	17.650.332.272,21	(6.848.857.140,51)
4 1 1 02 03	Cafe	1.637.872.308,20	2.847.542.997,07	236.806.152,00	2.886.349.149,07	(1.248.476.846,27)
4 1 1 03	Pejabat Hiburan	4.948.004.488,24	5.535.271.530,74	485.402.432,20	6.031.213.792,94	(1.083.209.302,74)
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2.963.995.500,00	2.933.781.000,00	290.248.500,00	3.214.029.500,00	(250.034.000,00)
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana/dll	414.881.073,17	546.977.900,00	25.750.000,00	572.678.000,00	(137.797.326,83)
4 1 1 03 05	Pameran	194.465.000,00	160.734.000,00	502.100,00	161.296.500,00	(2.600.000,00)
4 1 1 03 07	Karaoke	1.073.028.974,00	1.084.551.643,35	91.689.037,40	1.156.210.680,54	(83.181.706,54)
4 1 1 03 10	Pernikahan Bilyard	49.000.700,00	46.586.775,00	1.687.450,00	48.474.225,00	(3.488.525,00)
4 1 1 03 12	Pernikahan Bowling	40.367.525,00	36.505.650,00	3.358.350,00	39.864.000,00	900.525,00
4 1 1 03 15	Pernikahan Ketagasan	404.536.793,70	542.535.737,40	46.853.215,00	589.388.952,40	(184.852.159,70)
4 1 1 03 16	Pantai Pilgr/Refleksi	75.421.047,00	77.094.295,00	10.244.115,00	87.915.410,00	(12.494.363,00)
4 1 1 03 19	Pemandangan Olan Raga	99.410.004,37	58.998.900,00	16.504.625,00	75.507.525,00	23.902.479,37
4 1 1 03 20	Taman Refleksi	68.488.950,00	77.488.650,00	8.349.950,00	85.948.600,00	(17.359.750,00)
4 1 1 04	Pejabat Reklame	18.676.322.725,99	15.694.512.710,92	977.981.604,00	19.557.045.020,92	(880.520.296,93)
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Milka/Videocon/Megatron	14.506.359.280,00	15.694.512.710,92	373.991.716,00	16.308.504.436,92	(1.802.145.136,92)
4 1 1 04 02	Reklame Kalin	4.006.095.764,00	2.556.932.692,50	359.777.160,00	2.916.709.852,50	1.089.385.911,50
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker/Poster	8.139.521.999	14.175.000,00	-	14.175.000,00	(6.041.478,01)
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	18.978.218,00	240.000,00	-	240.000,00	18.738.218,00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	136.955.940,00	313.300.963,00	4.212.788,00	317.413.731,00	(180.457.791,00)
4 1 1 05	Pejabat Penerangan Jalan	40.602.101.561,82	41.722.076.969,76	4.082.501.161,42	45.805.478.131,28	(5.203.376.569,28)
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	40.496.945.636,94	41.539.693.857,00	4.063.653.510,00	45.603.347.367,00	(5.106.405.728,06)
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	105.157.922,98	183.383.112,76	18.847.651,42	202.130.764,18	(96.972.841,20)

Lanjutan Lampiran 4


4	1	1	07	Pajak Parkir	1.502.992.407,60	3.316.128.971,20	846.609.457,70	5.662.608.826,50	(1.500.967.421,90)
4	1	1	07	Pajak Parkir	2.501.998.407,60	3.316.128.971,20	340.699.457,70	3.662.595.829,50	(1.160.967.421,90)
4	1	1	08	Pajak Air Tanah	749.479.984,90	709.541.546,66	67.981.939,88	777.523.000,84	(28.047.115,64)
4	1	1	08	Pajak Air Tanah	749.479.984,90	709.541.546,66	67.981.939,88	777.523.000,84	(28.047.115,64)
4	1	1	11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,75	97.520.690.898,78	10.948.135.897,50	311.406.128.793,29	(11.416.128.793,29)
4	1	1	11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,75	97.520.690.898,78	10.948.135.897,50	311.406.128.793,29	(11.416.128.793,29)
4	1	1	22	Pajak Bumi dan Bangunan Perkoataan (PBB)	59.809.287.840,29	57.090.332.019,00	1.834.597.709,00	59.634.709.728,00	(4.346.321.709,72)
4	1	1	22	Pajak Bumi dan Bangunan Perkoataan (PBB)	59.809.287.840,29	57.090.332.019,00	1.834.597.709,00	59.634.709.728,00	(4.346.321.709,72)
4	1	4		PENDAPATAN LAIH-LAIN YANG SAH					
4	1	4	07	PENDAPATAN DENDA PAJAK					
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.885.717.659,41	2.885.717.659,41	357.919.990,32	3.243.637.650,73	(3.243.637.650,73)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.885.717.659,41	2.885.717.659,41	357.919.990,32	3.243.637.650,73	(3.243.637.650,73)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	37.974.792,73	37.974.792,73	6.732.394,94	44.707.187,67	(44.707.187,67)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	58.022.038,51	58.022.038,51	10.417.240,28	68.439.278,79	(68.439.278,79)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	58.022.038,51	58.022.038,51	10.417.240,28	68.439.278,79	(68.439.278,79)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.701.694,29	7.701.694,29	17.648,34	7.719.342,63	(7.719.342,63)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.701.694,29	7.701.694,29	17.648,34	7.719.342,63	(7.719.342,63)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	962.554,39	962.554,39	1.450.415,62	3.662.661,00	(3.662.661,00)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	962.554,39	962.554,39	1.450.415,62	3.662.661,00	(3.662.661,00)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	11.670.914,40	11.670.914,40	812.650,21	12.483.564,61	(12.483.564,61)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	11.670.914,40	11.670.914,40	812.650,21	12.483.564,61	(12.483.564,61)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	15.307.567,83	15.307.567,83	2.046.248,01	17.353.815,84	(17.353.815,84)
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	15.307.567,83	15.307.567,83	2.046.248,01	17.353.815,84	(17.353.815,84)
4	1	4	02	JASA GIRD	2.251.215.493,00	2.251.215.493,00	314.241.765,00	2.565.457.258,00	(2.565.457.258,00)
4	1	4	02	JASA GIRD	2.251.215.493,00	2.251.215.493,00	314.241.765,00	2.565.457.258,00	(2.565.457.258,00)
4	1	4	09	Jasa Giro Pemegang Kas			6.787.164,40	6.787.164,40	(6.787.164,40)
4	1	4	09	Jasa Giro Pemegang Kas Atas Jambong			6.787.164,40	6.787.164,40	(6.787.164,40)
4	1	4	09	Pendapatan Hasil Ektual atas Jamihan	400.500.208,26	400.500.208,26	18.008.804,67	418.509.012,93	(418.509.012,93)
4	1	4	09	Hasil Ektual Jamihan atas pembongkaran reland	400.500.208,26	400.500.208,26	18.008.804,67	418.509.012,93	(418.509.012,93)
4	1	4	10	Pendapatan dari Pengembalian lainnya					
4	1	4	10	Pendapatan dari Pengembalian lainnya					

Malang, JANUARI 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

I. ELADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681017 199203 1 006

**Lampiran 5 Target Realisasi Pendapatn Asli Daerah dan Penerimaan Pajak
Hotel di Kota Malang Tahun 2016**

 **PEMERINTAH KOTA MALANG**
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG
Kode Pos 65132


Malang, 26 Januari 2017

Nomor : 973/ 62 /35.73.405/2017
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s/d Bulan Desember 2016**

Kepada
Yth. BAPAK WALIKOTA MALANG
di-
MALANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat **Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016** sampai dengan Bulan Desember 2016, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG,
D. H. ADE BERAWANTO, MT
Pemina Utama Muda
NIP. 19681017 199203 1 006

Lanjutan Lampiran 5

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

10.	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	KETERANGAN
			DESEMBER 2016 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.	S/D DESEMBER 2016 Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PAJAK DAERAH	301,000,000,000.00	37,347,006,615.18	337,294,666,804.47	374,641,673,419.65	124.47	
	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		267,522,742.49	3,370,314,901.30	3,637,837,643.79	-	
	JUMLAH	301,000,000,000.00	37,614,529,357.67	340,664,981,705.77	378,279,511,063.44	125.67	

Malang, 17 JANUARI 2017
KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KOTA MALANG
M. HADE HESAWANTO, MT
Pembantu Daerah Muda
NIP. 19681017 199203 1 006

Lanjutan Lampiran 5

KODE REKENING		URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2016 SETELAH PAK		REALISASI PENERIMAAN DESEMBER 2016		S/D DESEMBER 2016		KURANG/LEBIH		% S/ BULAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1	1	HASIL PAJAK DAERAH	301,000,000,000.00	337,294,666,804.47	37,347,006,615.18	37,857,637,844.26	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	Pajak Hotel	27,680,570,300.00	34,108,608,671.31	3,748,549,172.95	18,069,580,299.45	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	01 Hotel Bintang 4	12,941,242,800.00	16,431,196,287.45	1,638,024,032.00	9,094,583,456.56	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	04 Hotel Bintang 3	6,673,775,700.00	8,128,679,700.56	965,503,756.00	3,350,820,810.70	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	05 Hotel Bintang 2	2,114,446,500.00	2,974,137,900.70	376,682,910.00	3,598,604,950.60	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	07 Hotel Melati	2,922,140,700.00	3,245,038,796.60	353,566,154.00	277,312,000.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	13 Wisata Pariwisata	1,022,920,000.00	251,150,149.00	264,651,851.00	979,707,423.70	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	01 Guest House	506,044,600.00	882,777,772.00	96,980,151.70	2,487,028,903.25	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	01 Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/ Rumah Kos	1,500,000,000.00	2,195,798,565.00	291,230,338.25	47,486,239,279.39	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	02 Pajak Restoran	34,976,524,500.00	43,309,256,479.40	4,168,972,799.99	23,534,895,464.07	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	01 Restoran	17,767,187,200.00	21,438,881,185.95	2,096,014,278.12	20,404,257,532.89	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	02 Rumah Makan	15,301,475,000.00	18,615,395,265.82	1,788,862,266.87	3,559,076,282.63	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	03 Cafe	1,887,872,300.00	3,274,980,027.63	284,096,255.00	6,510,023,251.65	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	03 Pajak Hiburan	5,443,000,000.00	6,453,431,095.15	456,592,455.50	3,144,935,530.21	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	01 Tontonan Film/Bioskop	2,963,391,000.00	2,944,679,807.21	200,258,728.00	285,030,312.50	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Buana/dll	614,881,000.00	271,416,562.50	14,613,750.00	192,487,050.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	03 Pameran	58,466,000.00	192,487,050.00	14,613,750.00	144,819,075.50	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	07 Karaoke	1,773,079,000.00	1,494,687,996.08	144,819,075.50	2,187,300.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	10 Permainan Bilyard	45,008,700.00	99,123,937.23	2,187,300.00	23,382,975.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	12 Permainan Bowling	15,367,500.00	793,056,472.00	66,641,517.00	23,382,975.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	13 Permainan Ketrampilan	404,536,800.00	123,755,516.50	13,776,910.00	859,697,989.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	16 Panti Pijar/Refleksi	75,421,000.00	167,143,979.63	6,637,500.00	137,532,456.50	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	19 Pertandingan Olah Raga	99,410,000.00	103,697,400.00	7,629,750.00	111,377,150.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	20 Taman Rekreasi	93,489,000.00	19,977,001,634.25	2,114,585,583.00	22,101,587,217.25	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	04 Pajak Reklame	18,076,522,700.00	19,977,001,634.25	2,114,585,583.00	3,291,652,670.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	01 Reklame Papan/Billboard/Milho/Videotron/Megatron	14,532,471,000.00	16,647,742,995.25	1,864,317,440.00	10,509,060,435.25	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	02 Reklame Kalan	4,006,095,800.00	3,043,096,175.00	748,556,495.00	1,020,000.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	03 Reklame Melekat/Suker/Poster	0.00	1,020,000.00	-	1,020,000.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	04 Reklame Selebaran	1,000,000.00	285,142,464.00	14,711,648.00	299,854,112.00	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	05 Reklame Berjalan	136,955,900.00	-	-	-	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	05 Pajak Penerangan Jalan	44,602,106,500.00	43,357,039,255.67	4,211,029,710.14	47,568,068,965.81	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	01 Pajak Penerangan Jalan PLN	44,495,948,500.00	43,168,939,170.00	4,193,921,876.00	47,568,068,965.81	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN	106,158,000.00	188,100,085.67	17,107,834.14	205,207,919.81	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	
4	1	1	02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN	106,158,000.00	188,100,085.67	17,107,834.14	205,207,919.81	374,641,673,415.65	(73,641,673,419.65)			124.	

Lanjutan Lampiran 5

4	1	1	07	Pajak Parkir	3,501,598,000.00	4,483,718,750.00	4,046,980,000.00	4,888,405,730.00	(3,386,407,730.00)	139.59
4	1	1	07	Pajak Parkir	3,501,598,000.00	4,483,718,750.00	4,046,980,000.00	4,888,405,730.00	(3,386,407,730.00)	139.59
4	1	1	08	Pajak Air Tanah						
4	1	1	08	Pajak Air Tanah	600,000,000.00	739,282,874.54	69,869,711.65	809,152,586.19	(209,152,586.19)	134.86
4	1	1	11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	600,000,000.00	739,282,874.54	69,869,711.65	809,152,586.19	(209,152,586.19)	134.86
4	1	1	11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	108,550,000,000.00	123,728,876,913.15	21,163,278,723.95	144,892,155,137.10	(36,342,155,137.10)	133.48
4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	108,550,000,000.00	123,728,876,913.15	21,163,278,723.95	144,892,155,137.10	(36,342,155,137.10)	133.48
4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	56,869,768,000.00	61,417,371,130.00	999,042,278.00	62,416,413,408.00	(15,547,145,408.00)	109.75
4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	56,869,768,000.00	61,417,371,130.00	999,042,278.00	62,416,413,408.00	(15,547,145,408.00)	109.75
4	1	4		PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH						
4	1	4		PENDAPATAN DENDA PAJAK	3,370,314,901.30	267,322,742.48	3,637,837,643.79	(3,637,837,643.79)		
4	1	4	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	3,200,817,418.09	282,100,564.91	3,482,916,983.00	(3,482,916,983.00)		
4	1	4	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	65,525,277.14	14,377,303.92	80,102,581.06	(80,102,581.06)		
4	1	4	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	65,858,772.80	7,371,215.97	73,229,988.77	(73,229,988.77)		
4	1	4	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	4,241,999.17	90,716.00	4,332,715.17	(4,332,715.17)		
4	1	4	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	33,894,900.00		33,894,900.00	(33,894,900.00)		
4	1	4	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	95,222.18	913.24	96,135.42	(96,135.42)		
4	1	4	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	7,868,945.24	414,320.00	8,283,265.24	(8,283,265.24)		
4	1	4	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8,651,205.56	704,296.78	9,355,502.34	(9,355,502.34)		
4	1	4	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	3,014,681,096.00	228,950,297.00	3,243,631,393.00	(3,243,631,393.00)		
4	1	4	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan						
4	1	4	06	Pendapatan Denda Pajak Parkir						
4	1	4	06	Pendapatan Denda Pajak Parkir						
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah						
4	1	4	07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah						
4	1	4	08	Pendapatan Denda Pajak PBB						
4	1	4	08	Pendapatan Denda Pajak PBB						
4	1	4	09	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	09	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	10	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	10	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	11	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	11	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	12	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	12	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	13	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	13	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	14	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	14	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	15	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	15	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	16	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	16	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	17	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	17	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	18	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	18	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	19	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	19	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	20	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	20	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	21	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	21	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	22	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	22	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	23	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	23	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	24	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	24	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	25	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	25	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	26	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	26	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	27	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	27	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	28	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	28	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	29	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	29	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	30	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	30	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	31	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	31	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	32	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	32	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	33	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	33	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	34	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	34	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	35	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	35	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	36	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	36	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	37	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	37	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	38	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	38	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	39	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	39	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	40	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	40	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	41	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	41	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	42	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	42	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	43	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	43	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	44	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	44	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	45	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	45	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	46	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	46	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	47	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	47	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	48	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	48	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	49	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	49	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	50	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	50	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	51	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	51	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	52	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	52	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	53	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	53	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	54	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	54	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	55	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	55	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	56	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	56	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	57	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	57	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	58	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	58	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	59	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	59	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	60	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	60	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	61	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	61	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	62	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	62	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	63	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	63	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	64	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	64	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	65	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	65	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	66	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	66	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	67	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	67	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	68	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	68	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	69	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	69	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	70	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	70	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	71	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	71	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	72	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	72	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	73	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	73	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	74	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	74	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	75	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	75	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	76	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	76	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	77	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	77	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1	4	78	Pendapatan Denda Pajak Lain-lain						
4	1									

Lampiran 6 Dokumentasi



Keterangan : Penelitian yang dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah

Lanjutan Lampiran 6



Keterangan : wajib pajak hotel kategori rumah kos di daerah Bandungrejosari,
Sukun Kota Malang.



Keterangan : Rumah Kos Eksekulsif di daerah Bandungrejosari, Sukun kota
Malang.

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ijin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

Malang, 15 Desember 2017
Kepada

Yth.

di

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 072/209.12.P/35.73.406/2017

Nomor	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian An. AMALIA DEWI INDRIYANA, (peserta : - orang terlampir).	1 (satu) lembar	Di kirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Lanjutan Lampiran 7



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/209.12.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kaprodi Perpajakan FIA UB Malang 18578/UN10.F03.12.12/PN2017 tgl. 15 Desember 2017 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : AMALIA DEWI INDRIYANA. (peserta : - orang terlampir).
 - b. Nomor Identitas : 135030401111013.
 - c. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Malang.
- dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:
- Badan pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d Pebruari 2018*.

Malang, 15 Desember 2017
An. KEPALA BAKESBANGPOL
PEMERINTAH KOTA MALANG
Sekretaris,

HERU MULYONO, S.P., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Kaprodi Perpajakan FIA UB Malang;
- Yang bersangkutan.



Lanjutan Lampiran 7



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 18578/UN10.F03.12.12/PN/2017
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Pelayan Pajak Daerah Kota Malang
Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor,
Jl. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang,
Kota Malang.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Amalia dewi Indriyana
Alamat : Perum Bumi Kepuh Permai blok B nomer 13, Sukun Kota Malang
NIM : 135030401111013
Jurusan : Administrasi Bisnis
Prodi : Perpajakan
Tema : Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 Desember 2017

a.n. Dekan
Ketua Program Studi Perpajakan



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



Lampiran 8 Peraturan Daerah Kota Malang**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010****TENTANG PAJAK DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,**

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur pajak daerah, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4199);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota

Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(3) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. motel;
- b. losmen;
- c. rumah penginapan; d
- . rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 10
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

CURRICULUM VITAE

Nama : Amalia Dewi Indriyana
 Nomor Induk Mahasiswa : 135030401111013
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Juni 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jl. Raya Hasan Kusuma No 28
 RT03 RW14 Kel. Tanjungpura
 Kec. Karawang Barat Kab.
 Karawang



Email : amaliadewiindriyana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Keterangan
2000-2001	TK Masyitoh, Karawang
2002-2007	SD Negeri Tanjungpura 3 Karawang
2008-2010	SMP Negeri 3 Karawang
2011-2013	SMA Negeri 3 Karawang
2014-2018	Universitas Brawijaya Malang